

**PERSPEKTIF ULAMA' SYURIAH NU JAWA TENGAH 2006-2008  
TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 185  
TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**MUHAMMAD CHABIB**

**NIM: 2102134**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2006**

Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag  
Jl. Pringgondani II Bangetayu Wetan,  
Genuk Semarang

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Nuhammad Chabib

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
Di tempat

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini  
saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Chabib

NIM : 2102134

Judul : **“Perspektif Ulama’ Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008  
Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Tentang  
Kedudukan Ahli Waris Pengganti”.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Semarang, 06 Desember 2006

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag

Ahmad Izzuddin, M.Ag

NIP. 150 231 368

NIP. 150 290 930

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG  
Jl. Prof. DR. Hamka. Km. 2. Semarang. Telp/Fax. (024)7601291**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Muhammad Chabib  
Nomor Induk : 2102134  
Judul **“Perspektif Ulama’ Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti”.**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

.....

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007.

Ketua sidang,	Semarang, 15 Desember 2006 Sekretaris sidang,
---------------	--

.....  
NIP.

Penguji I

.....  
NIP.....

Penguji II

.....  
NIP.

Pembimbing I

.....  
NIP.....

Pembimbing II

Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag

NIP. 150 231 368

Ahmad Izzuddin, M.Ag

NIP. 150 290 930

## MOTTO

قَالَ ۞: ثُمَّ َّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(الجناتية : 18)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ (النساء: 13-14)

قَالَ ۞: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (الحديث)

قال الشافعي: وهذا الصَّنْفُ مِنَ الْعِلْمِ دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ قَبْلَ هَذَا: عَلَى أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ: حَلٌّ وَلَا حَرَمٌ -: إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> محمد بن ادريس الشافعي، الرسالة، (بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ) ص. 39.

Muhamad Shahrûr, *Nahw Usûl Jadîlah Li Al-Fiqh Al-Islâmi*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanudin, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet. ke-2, 2004, hlm. 252.

## Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung-jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2006

Deklarator,

**Muhammad Chabib**

## ABSTRAKSI

Hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak bisa diterapkan secara otomatis, walaupun jumlah penduduk yang beragama Islam sangat mendominasi. Keinginan untuk menerapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia mengalami beberapa kendala, di antaranya karena adanya perbedaan pendapat ulama' dalam hampir setiap persoalan. Dalam kondisi seperti ini kepastian hukum sulit ditegakkan, karena tidak adanya buku hukum dan unifikasi Kompilasi Hukum Islam yang disepakati, sehingga sering terjadi suatu peristiwa hukum yang sama diputuskan oleh hakim dengan putusan yang berbeda. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan satu buku hukum menghimpun semua hukum terapan, yang dapat dijadikan rujukan oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang, maka keinginan untuk memiliki buku hukum dapat terkabulkan dengan adanya Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini merupakan *fiqh* Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Keberadaan KHI memberi jaminan tegaknya hukum Islam dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek kewarisan.

Dalam hukum kewarisan terdapat masalah yang selama ini menjadi perdebatan dikalangan ulama', termasuk di dalamnya pendapat ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008. yakni boleh tidaknya menerima warisan jika seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, apakah boleh digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris? Dan bagaimana metode *istinbâth* hukumnya?.

Memang KHI telah menetapkan seperti yang tertuang dalam pasal 185 yang disebut dengan istilah Ahli Waris Pengganti, bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sedangkan jumlah bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang diganti. Akan tetapi belum bisa secara menyeluruh diterima pengguna hukum.

Oleh karena itu, kerangka metodologi yang dipakai adalah pendekatan *kualitatif* untuk mendapatkan gambaran pola-pola kewarisan yang berlaku. Dan *library research* sebagai sumber data kepustakaan yang melandasi konsep ahli waris pengganti serta wawancara sebagai sumber data guna mendapatkan informasi (pandangan) langsung dari ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008. Dan juga pendekatan deskriptif terutama *content analysis* untuk menganalisa datanya.

Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dan tingkat intensitas perhatian terhadap anak yatim yang tinggi merupakan upaya mengangkat status anak ketika pada posisi seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Penulis.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah, penulis panjatkan kehadiran-Nya atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis. *Especialy* dengan selesainya penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan, petunjuk, dan perlindungan-Nya.

Niat untuk menulis skripsi ini sebenarnya sudah cukup lama (semester lewat), namun baru semester ini penulis mampu melaksanakannya. Di sela-sela penulisan skripsi ini penulis sempat mengalami kendala ketika penulis harus membagi konsentrasi kegiatan dan penulisan.

Maka, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini :

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A pengemban rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag mantan dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Izzuddin, M. Ag selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan tugas ini.

5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan *support* terhadap penulis.
6. Ayahanda Sahli yang selalu mendo'akan dan mengharapkan kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. *Wa bilkhusus* Almarhumah Ibunda Kaswati yang setiap saat senantiasa penulis rasakan kehadirannya menemani dalam kebahagiaan dan kesusahan, terutama saat-saat akhir menyelesaikan skripsi ini. Seolah menyeru dan menginstruksikan maju terus dan terus menuntut ilmu meneruskan perjuangan ulama dan menegakkan agama, menuntut ilmu adalah tidak mengenal umur. Saudara-saudara kandung penulis yang memberikan motivasi penulis untuk dapat merubah pola kehidupan yang selama ini bersama kita jalani.
7. *Ikhwan, Akhawat* "NAFILAH" dan segenap *bala kurawa* Asrama Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang memberikan pernik-pernik perjalanan hidup akademi penulis, dan semangatnya untuk menyelesaikan tugas akhir.

Semoga Allah allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di mata Allah dan makhluk-Nya.

Kalau isi skripsi ini baik dan bermanfaat, hanyalah semata-mata karena pertolongan dan petunjuk Allah. Sedangkan kalau skripsi kurang layak menjadi



suatu karya ilmiah, hanyalah semata-mata ketidakmampuan menulisnya dengan baik, semoga pembaca memakluminya dan Allah mengampuninya.

Pada akhirnya, penulis mengakui bahwa skripsi ini banyak kekurangan yang menonjol dalam penulisan ini. Yaitu menghindari terlalu tebalnya skripsi, dan contoh-contoh pembagian warisan yang tidak cukup rinci dan beraneka macam untuk berfungsi sebagai argumen, berarti butuh waktu lebih lama untuk dapat menyelesaikan tulisan ini.

Karya ini jauh dari satu kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu, saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi sangat penulis harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Semarang, 18 Desember 2006

Penulis

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti.

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A orang nomor satu di IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin, M. Ag pemangku jabatan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan sekaligus dosen wali studi penulis yang berkenan memberikan sumbangsih ide dan koreksi proses belajar.
3. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag kapasitasnya sebagai mantan dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan pembimbing satu dalam penulisan ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Izzuddin, M. Ag selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan tugas ini.
5. Seluruh dosen, staf karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan *support* terhadap penulis. Bapak Karyadi yang selalu membuatkan surat-surat keterangan aktif kuliah di saat penulis butuhkan untuk mengurus beasiswa dan kegiatan lainnya. Ibu Ulfa yang penyabar, semoga dengan pelayanan yang bijaksanaan yang arif, Allah mengangkat derajatmu demi kemajuan pelayanan kemahasiswaan Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah Tahun Khidmat 2006-2008, terlebih KH. Masruri Mughni, KH. Abdul Wahid Zuhdi, KH Ubaidullah Shodaqoh, KH. Najib Hasan yang telah berperan melancarkan penulis dalam mencari data dengan instrumen wawancara, juga waktu aktifitasnya kadang terganggu, semoga perjuangan mereka berkat, Amien.
7. DR. Ma'mun Effendy Nur, MA. Ph.D beserta istri tercinta Ibu Yuyun Effendy yang menjadi bapak dan ibu bahasa arab di IAIN Walisongo Semarang, senantiasa mereka merubah kebahasaan penulis menuju lebih *PD*.
8. Syekh Jamal Hasan Ahmad *mab'ûts* dari Mesir yang senantiasa membuat penulis semakin terbiasa dengan bahasa beliau dan menggali potensi penulis untuk selalu bersabardalam menghadapi kendala dan ujian hidup. Bapak Mahfudz Siddiq, Lc, Bapak Ahmad Furqon, Lc. MA, yang sudi diganggu waktunya untuk berdiskusi dan ber-*hiwar* ala '*araby* atas jasa mengarahkan penulis untuk selalu konsisten memegang bahasa al-Qur'an. Ust. Arja' Imroni, M Ag, yang menjadi sosok guru baru bagi penulis yang berkompeten dalam bahasa arab yang mengarahkan penulis dalam makalah dan ujian komprehensif, semoga dapat berlangsung sampai di kemudian hari.
9. Kepala UBINSA tercinta, DR. Suparman Syukur, MA yang menuntun penulis untuk lebih bisa berkarya, di dukung para stafnya, Ust Tholhah, MA, Ust. Hamdani Mu'in, Mbak Emi yang selalu memberi kesempatan

penulis untuk membuat jurnal bahasa dan terima kasih atas pinjaman komputernya.

10. Ayahanda Sahli yang selalu mendo'akan dan mengharapkan kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. *Wa bilkhusus* Almarhumah Ibunda Kaswati yang setiap saat senantiasa penulis rasakan kehadirannya menemani dalam kebahagiaan dan kesusahan, terutama saat-saat akhir menyelesaikan skripsi ini. Seolah menyeru dan menginstruksikan maju terus dan terus menuntut ilmu meneruskan perjuangan ulama dan menegakkan agama, menuntut ilmu adalah tidak mengenal umur. Saudara-saudara kandung penulis yang memberikan motivasi penulis untuk dapat merubah pola kehidupan yang selama ini bersama kita jalani.
11. Pegawai PT. Persero PLN Gajah Mungkur Semarang selatan, Bapak Suyuti, Juharsono dan bapak Heri yang sangat berjasa dalam membantu finansial akademi penulis hingga berakhirnya pendidikan tingkat perguruan tinggi ini semoga dapat berlangsung ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga Allah meninggikan derajat dan membalas amal shalih mereka dan jayanya PLN.
12. Ketua Yayasan amal Abadi Beasiswa – ORBIT Pusat dan Ibu Titiek Djamil Ghozali, MS, ketua Yayasan amal Abadi Beasiswa – ORBIT Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Sri Tantowiyah, M.Pd, yang bijak, Ibu Sri Dewanti winarno, M. Pd yang gemati membimbing anak-anak bimbing (ANBIM) ORBIT dengan sabar dan arif apalagi saat berceramah dengan jiwa ke''embok'' an-nya. Mas Mukhopim yang telah membantu penulis untuk

menerima beasiswa ORBIT sampai diperpanjang. Dan kru yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas jasa-jasanya sehingga sangat membantu aspek finansial penulis.

13. Bapak Shihabuddin, M.M dan Ibu Mahmuhanik, M.M merupakan orang tua penulis ketika kali pertama menginjakkan kaki di Semarang sampai sekarang semoga dapat besilaturrahmi sampai akhir hayat penulis, semoga Allah memberikan kelapangan dan berkat atas segala amal dan usahanya. Dan ibu-ibu yang lain yang berjasa dalam kehidupan penulis saat mengukir hidup di Borobudur Kembangarum Semarang Barat.
14. *Ikhwan, Akhawat* “NAFILAH” , senior Nafilah mbak Darul, Mas Sittah, bang Jun, mas Syifa’, MAS Nu’man, mas Qorib, Cak Anwar, mas arifin, yang telah menuju pelaminan mendahului penulis, mbak Nurul terima kasih atas pinjaam tempat untuk ber “Muktamar Sanawi” ria sampai beberapa kali, teman sejawat, seangkatan mas Irfan, Mas Munir, Mbak Nada, mbak anjar, Elin, Zae, Nurul dan mas Aqil yang telah mendahului lulus, *shohibul mindzor*, dan *akhi shogir* Ahlishod, dek ayuk beserta jajaran kepengurusannya yang selalu menuntut penulis untuk bersemangat terus dan dapat mengabdikan ilmunya di manapun termasuk di Nafilah sendiri, apalagi adik-adik a’dlo’ Nafilah yang masih baru dan imut teruskan perjuangan kakakmu dengan bersahaja.
15. Ust. Awaluddin Pimay, pengelolaasrama, Ust Muthohar, M.Ag, Ust Dede Rodin Pembina Asrama Mahasiswa, yang selalu mengarahkan cara pandang berfikir penulis, dan *bala kurawa* Asrama Mahasiswa IAIN Walisongo

Semarang Udien, terima kasih atas tukar pikiran dan idenya, syukron yang atletis, Fuadi komandan asrama, dan lainnya yang memberikan pernik-pernik perjalan hidup akademi penulis, dan semangat menyelesaikan tugas akhir.

16. Sahabat-sahabati di ekstra PMII, Fauzun, Gufron dll, bolo-bolo se-paket ASB '02 yang *gemati* dan *nurutan*, tak lupa sopir paket *andalan* Efoel Rembang, Olies, Rangga, Evi Les, Evi Dwie serta yang tak dapat disebutkan satu persatu.
17. Keluarga pak lurah dan teman-teman team KKN Posko XV di Ujung-ujung Pabelan Kab. Semarang mister Jue kordes, L-2y yang sabar dan senantiasa membantu penulis, Mafa dan istri, Istiq dll.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah berjasa dalam hidup penulis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI</b>	 <b>22</b>
A. Ta’rif Ahli Waris Pengganti.....	22
B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti .....	24
C. Ahli Waris Pengganti Menurut Fiqh Islam.....	29
D. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	37
1. Pihak-pihak Yang Menjadi Ahli Waris Pengganti.....	41
2. Bagian-bagian Ahli Waris Pengganti.....	42

<b>BAB III: PERSPEKTIF ULAMA SYURIAH NU JAWA TENGAH 2006-2008 TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGANTI.....</b>	<b>46</b>
A. Profil ulama' syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008.....	46
1. Otoritas Keilmuan Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah.....	54
2. Afliasai Bermadzhab Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah.....	59
3. Manhaj <i>Istinbâth</i> Hukum Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah...	61
B. Perspektif Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 Terhadap Ahli Waris Pengganti.....	64
 <b>BAB IV: ANALISIS PERSPEKTIF ULAMA SYURIAH NU JAWA TENGAH 2004-2008 TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 185 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGANTI.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis terhadap perspektif ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2004-2008 dalam KHI Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.....	70
B. Istinbâth hukum dalam pembagian warisan perpektif ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 tentang kedudukan ahli waris pengganti.....	75
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	83
C. Penutup .....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Semarang, 06 Desember 2006

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Chabib

NIM : 2102134

Judul **“Perspektif Ulama’ Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti”.**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

- 1 Proses bimbingan : .....
- 2 Kemampuan penulisan metode dan materi : .....
- Nilai rata-rata : .....

Demikian harap menjadi maklum adanya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing II

Ahmad Izzuddin, M.Ag

NIP. 150 290 930

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya, agar jauh dari kesesatan dalam berfikir dan bertindak, karena kesesatan membuat akal manusia tertutup dan akan membuat dosa-dosa besar serta kedzaliman di antara manusia. Oleh karena itu, Allah SWT sebagai pencipta, telah membuat aturan yang sebaik-baiknya guna mengatur ciptaan-Nya, baik manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk kelompok bermasyarakat. Individu dan masyarakat saling mempengaruhi, karena masyarakat merupakan individu-individu yang terkait antara satu dengan yang lain, sehingga terbentuklah suatu masyarakat.

Allah SWT menetapkan suatu aturan hukum (Syari'ah) sebagai pedoman hidup manusia, guna mengatur kehidupan yang Islami dalam arti yang hakiki sesuai dengan yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam Islam hanya Allah SWT yang maha kuasa dan Dia semata yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Karena itu hanya syari'ah yang dapat membebaskan manusia dari perhambaan kepada selain Allah SWT, sebagai umat Islam diwajibkan untuk

mengimplementasikan jalan tersebut dalam kehidupan nyata.

Sebagaimana QS. Al-Jasyah: 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(الجناتية : 18)

Artinya: “Kemudian kami telah membuatkan untukmu Syari’ah maka ikutilah ia dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dan ajaran-ajaran orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>1</sup>

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa hanya Allah SWT yang dapat memberikan petunjuk guna mengatur kehidupan manusia. Termasuk dalam petunjuk tersebut adalah tata cara perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan suatu aturan yang sangat adil. Oleh karena itu, Islam mengakui kepemilikan seseorang terhadap harta, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، وَنَصِيبًا مَّفْرُوضًا. (النساء: 7)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, hlm. 817.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan mempunyai bagian dan mempunyai hak mewarisi dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kerabat-kerabatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Al-qur'an juga menetapkan pengalihan harta warisan dari pewaris kepada masing-masing ahli waris seperti yang tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 7,11,12,33, dan 176.

Penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia sangat di pengaruhi oleh kemajemukan penduduknya, di mana kemajemukan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam, yang kemudian juga mempengaruhi perkembangan penafsiran terhadap konsep kewarisan dalam al-Qur'an, yang pada akhirnya melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kitab fiqh Indonesia.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya membicarakan perihal hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Arti penting dan kompleksitas berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebuah pangkal tolak untuk mengkaji dan memahami lebih jauh berbagai masalah yang berkenaan dngan Kompilasi Hukum Islam yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1991. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terlepas dari kondisi dan situasi pada saat itu<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur berbagai persoalan yang juga diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bersifat umum. Salah satunya

---

<sup>3</sup> ST. Rahmah, *Himmah; Jurnal Ilmu Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Palangkaraya :Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Palangkaraya, hlm. 8.

<sup>4</sup> Saekan dan Effendi Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 10.

persoalan yang diatur adalah masalah kewarisan. Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur dan ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki kekuatan hukum dan berlaku di Peradilan Agama.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam memberi jaminan tegaknya hukum Islam dalam beberapa aspek, termasuk kewarisan. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan pada kasus tertentu menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Sifat manusia yang menyukai harta benda dapat menjadi motivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut. Kenyataan yang demikian banyak dijumpai dalam masyarakat, seperti terjadinya kasus gugat waris di Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat penting dalam persoalan kewarisan adalah penetapan ahli waris, yaitu kriteria orang-orang yang berhak mendapat bagian warisan jika seseorang meninggal dunia.<sup>5</sup>

Ketentuan yang diatur dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>6</sup> Ash Shabuny berpendapat bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mewarisi harta pewaris, yaitu matinya orang yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 166.

mewariskan, baik menurut hakikat maupun menurut kukum, ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati, dan diketahui jihatnya<sup>7</sup> dalam mewaris.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka orang-orang yang berhak mejadi ahli waris menjadi semakin jelas, yakni ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, namun yang menjadi persoalan adalah jika terjadi pada ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka siapa yang berhak menggantikan untuk menerima warisan tersebut. Untuk penyelesaian pembagian warisan bagi ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa': 33 sebagai berikut

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. (النساء: 33)

Artinya: *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya."*<sup>9</sup>

Dalam ayat di atas juga belum begitu jelas siapa yang berhak menjadi ahli waris pengganti karena ayat tersebut hanya menyebutkan kerabat sedang pengertian kerabat adalah sangat luas. Sebagai contoh adalah seorang cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Dalam keadaan seperti ini apakah cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya

---

<sup>7</sup> Maksud *jihat* pada term kewarisan adalah status ahli waris dalam menerima harata warisan, sebab perkawinan, kerabat, atau wala'. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkâm al-Mawâri' fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Madzhab Al'arba'ah*, Dâr al-Kitab Al 'Araby: hlm. 14

<sup>8</sup> Muhammmad Ali Ash Shahbuni, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1995, hlm. 56.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit, hlm. 817.

(ibunya) untuk menerima warisan dari kakeknya yang pada posisinya ayah atau ibu mempunyai saudara. Kasus seperti ini sangat penting untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam (*komprehenship*) tentang bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kaitannya dengan upaya mengetahui kedudukan ahli waris pengganti, apakah cucu bisa mendapatkan harta warisan saat orang tuanya meninggal lebih dahulu pada posisi diatas, pada dasarnya sangat membutuhkan penafsiran dan kebijakan hukum yang maksimal (*ijtihad*) oleh orang-orang yang betul-betul kompeten di bidangnya. Dalam hal ini, ulama' menjadi garda depan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah adalah salah satu dari mereka yang mempunyai otoritas keilmuan dan kapabilitas fatwa yang mana hasil ijtihadnya menjadi rujukan operasional fiqh secara praktis.

Menengok strukturisasi ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 terbentang urutan sosok tokoh keagamaan ternama yang lebih didominasi oleh para kiai berpedoman pada al-Quran, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas<sup>10</sup> atau lebih akrab sebagai dewan agama organisasi masyarakat terbesar ini tentunya dalam bertanggungjawab literatur keagamaan mereka tidak mudah untuk menerima keputusan, pendapat lain yang tidak sejalan dengan faham —madzhab— yang mereka ikuti<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Lebih jauh baca; Abdul Kariem Husain, *NU menyongsong Tahun 2000*, Pegandon: CV. MA. Noer Chamid , 1989, hlm. 7.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 07 Juni 2006.

Lebih mendalam berbicara tentang konsep ahli waris pengganti sebagaimana terakumulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ijtihad ulama' Indonesia dalam kewarisan ini, ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 merasa tidak pernah ikut campur artinya tidak ikut serta dalam konsensi ulama' yang memproduksi “*fiqh*” hukum Islam Indonesia. Sehingga sampai saat ini mereka konsisten dengan prinsip madzhab yang dipertahankan dan mereka berpendapat —dengan berbagai literturnya— tidak ada istilah ahli waris pengganti (penggantian kedudukan) dalam hukum kewarisan Islam<sup>12</sup>.

Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, penulis tertarik dan ingin mengkaji terhadap apresiasi (perspektif) ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 terhadap konsep pembagian warisan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang kedudukan ahli waris pengganti, sehingga memunculkan solusi bagi pemberlakuan dan penetapan kedudukan ahli waris pengganti yang sampai sekarang masih kontroversi dikalangan para ulama'.

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan KH. Abdul Wahid Zuhdi, Wakil Syuriah I NU Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2006. Pernyataan ini sejalan dengan Firman, SH, seorang pakar hukum Universitas Jayabaya tahun 1983, ia mengemukakan pendapatnya “bahwa tidak dikenal ahli waris pengganti dalam hukum Islam”. Baca; Ramulyo Muh Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 123.



1. Bagaimana pendapat Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 tentang konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ?
2. Bagaimana *istinbâth* hukum Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dalam ilmu kewarisan terhadap konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ?

### **C. Tujuan penulisan skripsi**

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, secara umum penelitian ini diharapkan mempunyai suatu *ending* tujuan dan manfaat yang berarti bagi pemahaman masyarakat ilmiah (pengguna hukum) maupun masyarakat awam terhadap konsep kedudukan ahli waris pengganti. Oleh karena itu, secara khusus untuk dapat mengkomunikasikannya penulis tegaskan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara eksploratoris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perspektif Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 terhadap rumusan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185?
2. Mengetahui *istinbâth* hukum ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 berkaitan dengan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ?

#### D. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “*trial and error*”. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap<sup>13</sup>.

Kepustakaan (*literature review*) yang membahas tentang konsep ahli waris pengganti yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan karya-karya pakar fiqh Islam yang sudah menggarap tema ini boleh dikatakan cukup banyak. Namun, karya-karya tersebut lebih banyak membahas pada tataran teotitis, belum sampai kepada bagaimana reaksi ulama secara umum dan Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 secara khusus dalam menanggapi dan memberikan penilaian pada permasalahan yang dianggap masih kontroversi. Oleh karenanya, telaah pustaka dimaksudkan agar penulis dapat menemukan dan mencari —perbedaan dari konsep yang pernah diteliti— sebuah konsep baru yang lebih aplikatif.

Kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi terhadap pemahaman konsep ahli waris pengganti memerlukan pelacakan referensi

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2003, hlm. 112.

yang relevan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan fungsi keputastakaannya mengkaji atau telaah pustaka (*literature review*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul di atas. Seperti keputastakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya<sup>14</sup>. Dan aspek telaah pustaka dengan sumber acuan khusus artinya menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu keputastakaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian<sup>15</sup>.

Seperti Buku "*Hukum Waris Islam*" karya Muhammad Ali Ash Shabuni dalam hal warisan lebih fokus membahas pada tata cara pembagian harta warisan (*tirkah*) yang solutif. Disamping itu, dibahas pula dalam buku ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris untuk dapat mewarisi harta pewaris dengan jalan yang sah dan dibenarkan dalam Islam.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2000 yang menjadi peta penyelesaian fiqh Indonesia, dalam skripsi ini menjadi

---

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998, hlm. 66.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Shabuni Ash, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1995, hlm. 56.

kunci pembahasan, sebagai rujukan pokok, karena darinya dapat diketahui ketentuan berlakunya ahli waris pengganti.

Buku *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* karya Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. yang lebih banyak mengupas tentang perjalanan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sebuah rujukan ber-*fiqh* “ala” Indonesia dan kajian yang mendalam dari pada kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut juga menjadi “dekorasi utama” dalam panggung penulisan skripsi kewarisan ahli waris pengganti ini<sup>17</sup>.

Pakar hukum sekaligus guru besar dalam bidang hukum Islam, Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris* menggagas konsep ahli waris pengganti merupakan tawaran yang solutif bagi penyelesaian kasus pembagian warisan yang berkaitan posisi ahli waris pengganti dan dapat diproses di Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

*Al-Mawaris fi asy syari’at al Islamiyyah fi dhou’ al kitab wa al sunnah* karya Muhammad Ali Ash Shabuni dan *Ushul ‘ilm al Mawaris* karya Ahmad Abdul Jawad editor Muhammad Sa’id al Khabaly lebih rinci mentafsirkan makna *Dzawil Al-rham* kaitannya dengan kedudukan ahli waris pengganti (cucu) yang dapat dan tidak mewarisi harta pewaris.

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 294-335.

<sup>18</sup> Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. IV, 2002, hlm. 195.

*Fath al-Qarib al-Mujib bi Sarh al-kitab al-tartib* yang lebih terkenal dengan sebutan kitab *al-Syansyûry* adalah referensi wajib yang membeberkan masalah kewarisan, sehingga tercatat menjadi tempat kajian ilmu kewarisan yang harus diposisikan dalam barisan yang signifikan<sup>19</sup>.

Sedangkan untuk membidik keberadaan Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah yang dalam kiprahnya menjadi tolok ukur mufti masyarakat pada umumnya tepat apabila "*Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*" karya Rozikin Dawam, sebagai bahan referensi selang pandang mengetahui eksistensi ke-*ulama'*-annya dan kiprah berjihad dalam berbagai situasi dan kondisi sehingga keutuhan fatwanya dapat dipertanggungjawabkan, mulai faham ajaran keberagaman sampai kepada faham bermadzhah.<sup>20</sup>

Judul buku *NU Menyongsong Tahun 2000* karya Abdul Karim Husain yang dikomentari oleh KH. Abdurrahman Wahid, turut menghiasi karya tulis yang sedang digarap penulis, dengan asumsi buku ini paling tidak menyajikan dinamika keberadaan tahun-tahun berlangsungnya kondisi NU pasca tercetusnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kiai Abdullah Wahid Zuhdi, wakil rais syuriah NU Jawa Tengah 2004-2008 tanggal 10 Juni 2006. lebih lanjut Gus Wahid —panggilan akrabnya— mengomentari kitab ini adalah sebagai induknya referensi dalam mengkaji persoalan kewarisan dikalangan *nahdliyyin*, dikarenakan kitab tersebut memuat bahasan kewarisan yang luas serta contoh-contoh permasalahan yang cukup mewakili dan masih dalam koridor madzhab wilayah mereka.

<sup>20</sup> Baca lebih lanjut; Dawam Rozikin, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 54-66.

Untuk memperkuat kajian pustaka yang ada relevansinya dengan judul di atas diantaranya *Ahli waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, karya Al Yasa Abu Bakar, *Perbandingsn pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* karya M. Idris Ramulyo, juga dari berbagai sumber kajian pustaka lainnya yang mendukung dan memperkuat pelengkap informasi skripsi.

Referensi yang lainnya adalah buku berjudul *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, karangan Jaih Mubarak, yang cetakan pertamanya pada bulan Nopember 2002, di mana buku ini memunculkan metode cara pengambilan hukum dan yang berkaitan dari berbagai organisasi masyarakat yang termasuk di dalamnya Metode Ijtihad NU<sup>21</sup>, dengan harapan skripsi ini tidak pincang ketika berjalan menuju bangunan konsepsi bermadzhah ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008.

Karya ilmiah yang baru-baru muncul membahas secara khusus dalam term ini misalnya, Jurnal *Himmah: Ilmu keagamaan dan Kemasyarakatan* yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Palangkaraya.

Khosidah Fakultas Syari'ah angkatan 1995 dalam karya ilmiahnya mengangkat tentang ” *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti*” dalam

---

<sup>21</sup> Lebih lanjut baca; Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 179-180.

penelitiannya berkesimpulan bahwa Fazlur Rahman mempunyai pendapat yang sejalan dengan konsep ahli waris pengganti.

Wiwin Hidayati Fakultas Syari'ah angkatan 1999 dalam karya ilmiahnya yang berjudul ” *Ahli Waris Pengganti Dalam Berbagai Sumber (sebuah Analisis Komperatif untuk mencari pihak-pihak yang dikatagorikan sebagai Ahli Waris Pengganti)*”.

Namun, dari berbagi referensi yang penulis dapatkan sejauh ini hanya membahas tentang konsep umum kewarisan —baik dalam ilmu kewarisan Islam pada umumnya ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)— berkaitan rumusan dan status ahli waris pengganti. Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian yang digarap penulis yaitu sebuah penelitian yang langsung menyinggung bagaimana pendapat ulama dan masyarakat terutama ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dalam perspektifnya menilai dan merespon tidak sependapat dengan konsep ahli waris pengganti dalam fiqh kewarisan Islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas persoalan ini dalam sebuah karya ilmiah. Dengan harapan penelitian ini menjadi sumbangan baik wacana keilmuan untuk pengembangan hukum Islam.

#### **E. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Maka dari itu, untuk menjadi sebuah

katagori skripsi yang memenuhi klasifikasi dan kriteria karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan isinya, maka penulis mengumpulkan data skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Skripsi yang disajikan dengan orientasi validitas hukum yang menggejala dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum muslim yang bersinggungan langsung dengan hal kewarisan berikut membutuhkan data-data akurat secara sistematis, faktual dan akurat, maka lebih tepat dikatagorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan *kualitatif*. Yaitu sebuah penelitian atau karya ilmiah yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya (termasuk hukum) dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>22</sup> Pola-pola tadi dianalisis menggunakan teori yang obyektif. Dengan istilah lain pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi, keadaan dan kondisinya menekankan pada deskripsi secara alamiah<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 21.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, hlm. 11.



## 2. Metode pengumpulan data

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas dari mana subyek data diperoleh, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber dan informasi yang berkaitan langsung dengan judul diatas, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagaimana berikut :

### a. Dokumentasi

Instrumen pengukur variabel penelitian memegang peranan penting dalam usaha memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Bahkan validitas hasil penelitian sebagian besar sangat tergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data<sup>24</sup>. Dokumentasi merupakan metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini. Dokumentasi, sesuai asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data yang bersumber pada tulisan yang dapat berbentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data ini berfungsi sebagai upaya mengumpulkan dan mendapatkan data melalui buku-buku, karya ilmiah, dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan skripsi ini. Dan data dokumentasi yang harus dikumpulkan dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, Sumber data primer yaitu sumber data wajib

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 34

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. cit.*, hlm. 135.

penelitian berupa fakta yang digunakan untuk menguji hipotesis kajian ini<sup>26</sup>. Seperti ”*Hukum Waris Islam*” karya Muhammad Ali Ash Shabuny, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Departemen Agama RI direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kewarisan Islam Di Indonesia* karya Sajuti Thalib, *Al-Mawâris fi al- Syari’at al Islâmiyyah fi Dhou’ al Kitâb wa al Sunnah* karya Muhammad Ali Ash Shabuni dan *Ushûl ‘ilm al Mawâris* karya Ahmad Abdul Jawad dan lain sebagainya. *Kedua*, Sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya, dan data ini berwujud dari dokumentasi, data laporan atau bahan informasi lainnya yang telah tersedia<sup>27</sup>.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dan tetap berlandaskan tujuan penelitian.<sup>28</sup> Disamping itu teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu kaitannya dengan sekripsi ini, yang diantara tujuannya adalah untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang

---

<sup>26</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995, hlm. 132

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 129.

dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapatkan berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian<sup>29</sup>. Dalam pengumpulan data skripsi ini, wawancara yang sebagai data empirik atau data lapangan, peneliti menanyakan langsung tentang permasalahan yang erat kaitannya dengan reaksi, penilaian atau lebih tepatnya perspektif ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan ahli waris pengganti. Adapun dalam instrumen wawancara yang berpedoman *semi structured*<sup>30</sup> ini penulis dalam pengambilan sampling lebih condong pada jenis *purposive sample* yaitu pemilihan kelompok subyek — person yang di wawancara— didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>31</sup>. Karena pada dasarnya penelitian kualitatif menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*)<sup>32</sup>. Populasi yang dibidik peneliti yaitu kaum elit agamawan ulama' yang kultur keberagamaan mengikuti manhaj *ahl al- sunnah wa al-jama'ah* bernama organisasi Nahdhatul Ulama'.

---

<sup>29</sup> Burhan Ash Shofa, *Op. cit*, hlm. 95.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Loc.cit*, hlm. 202.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Op. cit*, hlm. 84.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 165.

### 3. Metode analisa data

Aktivitas menganalisis data adalah suatu usaha untuk melakukan pembacaan terhadap variabel data yang telah didapatkan dan diklasifikasikan berdasarkan kriterium yang sesuai secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan valid<sup>33</sup>.

Setelah data dikumpulkan dari lapangan yang cukup dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk mendapatkan konklusi dan hasil yang faktual, tahap berikutnya penulis mengolah dan menganalisis data-data (*variable*) penelitian menggunakan metode analisis non-statistik yaitu menganalisa data yang substansi bahan-bahan data berupa deskriptif atau data *textular*. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu macam langkah analisis yang penulis pilih juga disebut analisis isi (*content analysis*)<sup>34</sup>. Pendekatan ini menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan landasan kewarisan ahli waris pengganti baik dalam kewarisan islam ataupun Kompilasi Hukum Islam.

Disamping menggunakan analisis isi, penelitian yang variabel-variabel data lebih disajikan secara deskriptif —baik

---

<sup>33</sup> Dadang K. Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 102

<sup>34</sup> Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hlm. 85. lihat; Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-7, 2005, hlm. 244.

variabel bersumber dari kepustakaan maupun wawancara— maka tampilan dalam penyajian datanya adalah bersifat deskriptif analisis (*deskriptif analysis*)<sup>35</sup>. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data dan validitas konklusi.

#### **F. Sistematika penulisan skripsi**

Adalah penting menyusun sistematika penulisan dalam sebuah karya ilmiah dengan maksud bahwa penelitian tersebut ditampilkan terstruktur, terencana dan fokus. Skripsi ini tersusun dalam lima katagori bab, masing-masing bab membahas persoalan tersendiri, akan tetapi antara bab yang satu dengan yang lainnya selalu mempunyai sinergitas pembahasan artinya antara bab satu dan bab berikutnya masih mempunyai korelasi arah pembahasan yang terkait dan terstruktur.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: *Bab pertama*, menguraikan latar belakang masalah, pokok dan perumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. *Bab kedua*, membahas teori tentang ahli waris pengganti dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kacamata ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 beserta dasar hukumnya sehingga dapat diketahui kedudukan ahli waris pengganti dan bagian-bagian yang dapat diterima oleh ahli waris yang menempati posisi

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 268

ahli waris pengganti. *Bab tiga*, bab ini memberikan gambaran umum profil ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dilengkapi afiliasi bermadzhab dan metodologi *istinbâth* hukumnya. *Bab empat*, bab ini memuat analisis terhadap pandangan dan penilaian ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 mengenai kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masih dalam bab ini, memaparkan pula gagasan atau tawaran ide ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dalam *istinbâth* hukumnya sebagai alternatif penyelesaian pembagian warisan ketika pada posisi ahli waris pengganti. *Bab lima*, merupakan akhir dari perjalanan penulisan skripsi. Pada bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan yang paling penghujung adalah penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

#### A. Ta'rif ahli waris pengganti

Secara sederhana kata ahli waris pengganti terdiri dua arti kata yang berbeda yaitu ahli waris dan pengganti. Ahli waris yang berarti orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris<sup>1</sup>, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>2</sup>. Dan pengganti dapat diartikan orang yang menggantikan posisi orang lain untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu<sup>3</sup>, dalam hal ini orang lain itu adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Khusus kata pengganti, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyebutnya dengan istilah *Bij-Plaatsvervulling* atau *Representasi*, yang apabila kata tersebut ditelusuri dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan perbuatan mewakili, keadaan diwakili, atau apa yang mewakili (perwakilan)<sup>4</sup>. Dengan demikian —menurut penulis— arti yang

---

<sup>1</sup> Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Departemen Agama RI, *Bahan penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000, hlm. 166.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Definisi ini adalah digunakan oleh Sajuti Thalib, SH diambilkan dari terjemahan kata *mawâli* QS.An-Nisa':33 yang olehnya diartikan ahli waris pengganti. Lihat, Sajuti Thalib, SH, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-8, 2004, hlm. 80 dan 150.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. hlm. 836.

pertama (perbuatan mewakili) dalam term kewarisan lebih tepat dipergunakan, walaupun pada bahasan-bahasan yang lain tidak digunakan.

Wiryono Projodikoro seorang pakar hukum —yang tidak sependapat tentang adanya kedudukan ahli waris pengganti— tidak menggunakan istilah ahli waris pengganti, akan tetapi ia secara populer menggunakan istilah penggantian warisan, sebagaimana komentar dalam buku karangannya “Dengan demikian ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan”<sup>5</sup>

Sedangkan Prof. Hazairin berpendapat bahwa *mawâli* atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadiya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris<sup>6</sup>. Hazairin sebagai pencetus gagasan hukum kewarisan yang mengenal penggantian tempat ini mencontohkan seorang cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orang tua cucu yang meninggal terlebih dahulu itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm. 43. Komentar mengenai tidak sependapat dengan adanya konsep ahli waris pengganti adalah Firman, SH, seorang pakar hukum Universitas Jayabaya tahun 1983, ia mengemukakan pendapatnya “bahwa tidak dikenal ahli waris pengganti dalam hukum Islam”, dikutip dari Ramulyo Muh Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 123.

<sup>6</sup> A.Rachman Budiono *Pembaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 22.

<sup>7</sup> *Ibid.*



Lebih lanjut Sajuti Thalib mengemukakan pernyataan tentang ahli waris pengganti yang berdasarkan penjelasan QS. IV : 33

“Kegunaan ayat 33 ini diturunkan oleh tuhan Allah adalah untuk penampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu di sini, anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris. Sebenarnya dengan QS. IV : 7, 11 dan 12 maka hal-hal yang perlu dalam keadaan biasa telah terselesaikan yaitu warisan untuk anak, ibu bapa, janda duda dan saudara-saudara. Tetapi nyatanya ada sesekali akan timbul kepentingan penyelesaian atas kasus kewarisan yang ahli waris pertama yaitu anak telah mati lebih dahulu dari pewaris”.<sup>8</sup>

Dari pijakan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti (*platvervulling* atau *mawâli*) secara umum definisinya adalah penggantian ahli waris (cucu) untuk mendapatkan hak warisan yang menggantikan posisi ahli waris (anak) karena meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris.

## **B. Dasar hukum ahli waris pengganti**

Pada umumnya, segala hukum Islam adalah sudah ada ketentuan dari Allah. Sudah barang tentu prioritas mendasarkan segala hukum yang pertama adalah kepada al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan dalil atau nash al-Qur'an yang menunjukkan dasar hukumnya baru didasarkan al-Sunnah.

---

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, SH, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina aksara, Cet. ke-3, 1987, hlm. 151.

kemudian apabila tidak ada dalam keduanya maka *ijtihâd* menjadi alternatif penyelesaiannya.

Diantara ayat yang menegaskan untuk berpegang teguh pada ketentuan tersebut sebagai dasar hukum adalah QS. Al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا (النساء: 59)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya<sup>9</sup>.”

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang berarti mengikuti al-Qur'an dan al-Sunnah, sedang perintah mentaati *ulil amri* di antara muslimin, artinya mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahidîn*, karena mereka itulah *ulil amri* umat islam dalam soal pembentukan hukum syari'at Islam<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Khadim al Haramain asy syarifain, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' al Malik Fadh li Thiba'at al Mush-haf, hlm. 128.

<sup>10</sup> Idris Jakfar, Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, Cet. ke-1, 1995, hlm. 9.

Kemudian permasalahan hukum kewarisan dalam islam<sup>11</sup>, Allah SWT juga telah memberikan dasar hukumnya dengan jelas di dalam *al-Qur'an al-karîm* surat *al-Nisâ'* ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء: 13-14)

Artinya: *Hukum-hukum waris adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang benar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan*<sup>12</sup>.

Bermula dari pandangan di atas ulama' fiqh menjadikan al-Qur'an sebagai pijakan dalam mengkaji ilmu-ilmu kewarisan termasuk di dalamnya kajian ahli waris pengganti, yang kemudian mereka —ulama' fiqh— memfokuskan pada QS. Al-Nisa'(4) ayat 33 sebagai sumber utama dasar hukum tentang ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti yang apabila dilihat dari sisi bahasa adalah *mawâli* yang artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk

<sup>11</sup> QS. 4:13. Hukum-hukum waris adalah ketentuan Allah. Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Jakarta: Hasanah, 2001, hlm. 352.

<sup>12</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain, *op cit.*, hlm. 118

memperoleh bagian warisan yang tadinya diperoleh orang yang digantikan orang itu, tetapi orang yang digantikan meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, atau yang secara implisit tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 185 (1) disebutkan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, adalah berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa’(4); 33 sebagai berikut:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (النساء : 33)

Artinya: “Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya”.<sup>13</sup>

Ayat di atas ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama’. Hazairin menafsirkan kata *mawâli* dalam ayat di atas bahwa: ”bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawâli* bagi harta peninggalan orang tua dan mendiang *aqrabûn*, Allah mengadakan *mawâli* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabûn*-nya”<sup>14</sup>. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hamka kata *mawâliyah* adalah keluarga yang akan menerima waris, sebab arti khusus menurut Hamka, bahwa bagi tiap-tiap harta benda yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat itu, kamu adalah waris yang akan menerima dan menguasainya<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, hlm. 817.

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1989, hlm. 29.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Jakarta; Panjimas, 1983. hlm. 41.

Dalam menentukan status seorang pengganti ahli waris, Rasyid menggolongkan sebagai *dzaw al-furûdh* yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak yang telah meninggal lebih dahulu. Demikian pula Hazairin menetapkan ahli waris pengganti sebagai ahli waris. Hazairin menafsirkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa' (4) : 33 dengan menterjemahkan secara bebas yaitu<sup>16</sup>:

“Dan untuk setiap orang itu, Allah telah mengadakan *mawâli*-nya bagi harta peninggalan ayah dan anak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan tolan seperjanjian karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.<sup>17</sup>

Kitab al-Quran dan terjemahannya menterjemahkannya dengan :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris). Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”<sup>18</sup>

Berbeda dengan terjemahan di atas, Ahmad Rofiq mensinyalir ayat tersebut dengan ungkapannya: bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti bukan statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan

---

<sup>16</sup> ST. Rahmah, *Himmah; Jurnal Ilmu keagamaan dan Kemasyarakatan*, Palangkaraya: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Palangkaraya, hlm. 10.

<sup>17</sup> Abu Bakar, al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies- INIS, 1998, hlm. 54.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* Dalam kajian hukum, pewaris adalah orang yang meninggal dan ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Dalam pemakaian “awam” sering dikacaukan antara istilah pewaris dan ahli waris. Contoh populer adalah terjemahan bebas sebuah hadis rosul “Ulama’ adalah pewaris nabi” terjemahan yang tepat seharusnya berbunyi “ ulama’ adalah ahli waris nabi-nabi”.Jassin juga menggunakan istilah pewaris untuk ahli waris. Lihat. Jassin, *Bacaan Mulia*, Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942, Cet. ke-2, 1982, hlm. 110.

langsung dengan si pewaris. Tetapi semata-mata karena harta yang diterima itu sedianya merupakan bagian yang diterima ayah atau ibunya<sup>19</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' dalam menentukan status ahli waris pengganti. Namun, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti bisa berstatus sebagai ahli waris, dengan alasan bahwa seorang pengganti yang mengganti posisi ahli waris, berarti pengganti itu disebut ahli waris yang berhak menerima warisan<sup>20</sup>.

### C. Ahli waris pengganti menurut fiqh islam

Ketentuan umum yang berlaku pada kewarisan Islam (*fiqh al-mawâris*) adalah jika seorang pewaris meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi hanyalah anak-anaknya (ahli waris) yang masih hidup. Kemudian jika ada diantara anak-anak itu yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka ia tidak berhak mewarisi karena salah satu syarat utama menjadi ahli waris adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia<sup>21</sup>. Maka anak-anak dari seorang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu (cucu pewaris) tidak berhak mewarisi karena mahjub oleh pamannya (anak-anak pewaris) yang lain.

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997, hlm. 419.

<sup>20</sup> ST. Rahmah, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>21</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkâm al-Mawâris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Madzhab Al'arba'ah*, Dâr al-Kitab Al 'Araby: hlm. 14. lihat juga; *Syari'ah the Islamic law*. Terj. Zaenudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 353

Inilah fenomena yang terjadi dalam *fiqh al-mawâris* sebagaimana ketentuan para madzhab jumhur. Oleh karena itu istilah ahli waris pengganti secara definitif tidak ditemukan dalam literatur-literatur *fiqh al-mawâris* klasik. Walaupun fenomena ini sudah lama muncul, namun ahli waris pengganti secara formulatif tidak dikenal dalam kewarisan fiqh islam (*islamic Jurisprudence*)<sup>22</sup>.

Ahli waris pengganti atau hal kewarisan yang memperbincangkan masalah kedudukan cucu sebagai generasi kedua setelah anak di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Karena di sana telah diatur dengan jelas siapa-siapa yang mendapatkan bagian harta waris dan berapa bagian yang mereka terima<sup>23</sup>.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, أَبَاؤُكُمْ

<sup>22</sup> Kata *fiqh* secara etimologi “paham yang mendalam”. Bila kata faham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu dhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmidzi menyebutkan fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: angkasa Raya, Cet. ke-2, 1993, hlm. 15. dan lihat; Wiwin Hidayati, “Ahli Waris Pengganti Dalam Berbagai Sumber (Sebuah Analisis Komparatif untuk mencari pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Ahli Waris Pengganti)”, Skripsi sarjana Syari’ah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN Walisongo, 2004, hlm. 38, t.d.

<sup>23</sup> Khosidah, “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Fazkur Rahman Tentang Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti”, Skripsi sarjana Syari’ah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 18, t.d.

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا Q (النساء: 11)

Artinya: Allah mensyari'tkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daridua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkannya, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu napaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu. kamu tidak mengetahu siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.al-Nisa'; 11)<sup>24</sup>.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ،

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ Q (النساء: 12)

<sup>24</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain, *op cit.*, hlm. 118



*Artinya: Dan bagimu(suami-suami)seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak,maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak , maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidakmeninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara seorang laki-laki (seibu seayah) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang , maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS.al-Nisa'; 12)<sup>25</sup>.*

Dalam ayat-ayat al-Quran atas —khusus dalam bidang kewarisan—apabila dikaji lebih mendalam terlihat bahwa kedudukan cucu tidak dirinci bagian-bagian atas warisan. Sedangkan yang dirinci adalah anak, orang tua (bapak, ibu) saudara, suami/istri. Tiga ahli waris yang disebut pertama ialah karena hubungan darah dan dua ahli waris yang disebut kemudian adalah ahli waris karena perkawinan <sup>26</sup>

Kemudian sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, al-Sunnah merupakan petunjuk apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an atau diatur tetapi hanya secara garis besarnya saja. Ternyata, al-Sunnah juga tidak merinci secara jelas bagian cucu, maka dicari jalan keluarnya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Khosidah, *Loc.cit.*

dengan metode *ijtihâd*, salah satu *ijtihâd* untuk menentukan bagian cucu adalah *ijtihâd* yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit<sup>27</sup>. Dan pada saat itu, *ijtihâd* Zaid bin Tsabit mendapat pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat *ijtihâd* tersebut dilakukan. Penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki merupakan sesuatu yang sangat logis, sebab alam pikiran patrilineal amat mempengaruhinya<sup>28</sup>.

Dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkan posisi cucu —dari keturunan atau melalui anak laki-laki— bukan sebagai pengganti ayahnya. Sedangkan untuk cucu laki-laki ataupun perempuan melalui garis keturunan perempuan termasuk *dzaw al-arhâm*<sup>29</sup>. Para ulama' ini menganut dan berkiblat ajaran Zaid bin Tsabit yang desetujui oleh imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain, sebagaimana hadits Rasul yang diriwalkan oleh Imam Bukhari berbunyi :

---

<sup>27</sup> Zaid bin Tsabit yang bergelar “Aba Sa'id”, Aba Abdurrahman, Aba khorijah, adalah sekretaris Rasulullah yang paling ahli dalam Ilmu Faraidl. Lihat; Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986, 192-194.

<sup>28</sup> A. Rachmad Budiono, *op.cit* hlm. 29.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-4, hlm. 78. lebih lanjut baca; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 10, Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, 1997, Cet. ke-7, hlm. 7853. lihat; Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2002, Cet. ke-1, hlm. 40.

بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الْإِبْنِ. وَقَالَ زَيْدٌ: إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ  
الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ  
وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ ۖ (رواه البخاري)<sup>30</sup>

Artinya: (Dalam bab kewarisan cucu ketika tidak ada anak laki-laki) Zaid Ibnu Tsabit berkata: cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki melalui anak laki-laki kedudukannya sama sederajat dengan anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka sama mewarisi dan menghiyap seperti anak dan tidak mewaris cucu bersama dengan anak laki-laki. (diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

Inti ajaran Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya dinamakan ahli waris *dzaw al-arhâm*, yang mereka semuanya tidak menerima harta warisan.

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki jenisnya maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika<sup>31</sup>;

1. sudah tidak ada *ashâb al furûdl* (orang yang berhak fara'id) atau ashabah sama sekali,
2. apabila *ashâb al furûdl* yang mewarisi bersama-sama dengan *dzaw al-arhâm* itu salah seorang suami istri, maka salah satu seorang suami istri mengambil bagiannya (*fardl*) terlebih dahulu baru kemudian

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohîh al-Bukhari*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1982, hlm. 189.

<sup>31</sup> Idris Ramulyo, *op. cit*, hlm. 125.

sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh diraddkan kepada salah satu suami istri selama masih ada *dzaw al-arhâm*. Sebab meraddkan sisa lebih kepada salah seorang suami istri dikemudiankan (diakhirkan) daripada menerimakan kepada *dzaw al-arhâm*.

Jadi kesimpulan yang didapat dari uraian ini pada intinya adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewaris. Cucu melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Sehingga dapat dikategorikan bahwa dalam fiqh mawaris islam tidak dikenal ahli waris pengganti (*bij plaatvervulling*). Dan disebutkan juga dalam *fiqh ahl al- sunnah wa al-jamâ'ah* bahkan juga dalam fiqh aliran syi'ah ditetapkan bahwa anak laki-laki menghijab cucu laki-laki dan perempuan baik anak itu ayah sendiri dari cucu atau tidak. Oleh karenanya cucu yang ayahnya meninggal lebih dahulu tetap tidak mendapat warisan dari kakeknya karena ada anak kakek itu yang masih hidup yang menutupnya, meskipun si anak yang menghijab itu tidak pernah berbuat jasa dalam mengurus ayahnya<sup>32</sup>.

Kasus kewarisan cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu terhadap harta warisan kakek sebagaimana disinggung di atas, muncul dalam pembicaraan pada seminar Hukum Nasional I yang diadakan di Jakarta tahun 1963<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 134.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, disebutkan dalam aturan kewarisan fiqh sunni<sup>34</sup> ahli seperti darah<sup>35</sup> dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dzaw al-furûdl*, *asâbah* dan *dzaw al-arhâm*<sup>36</sup>. *Dzaw al-furûdl* adalah ahli waris yang bagiannya dalam warisan telah ditentukan. *Asâbah* adalah ahli waris yang mempunyai bagian terbuka dalam warisan dan karenanya selalu mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *dzaw al-furûdl* tadi. Mereka adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan melalui garis laki-laki kepada pewaris dengan tertib prioritas tertentu, misalkan selama masih ada anak laki-laki maka cucu laki-laki tidak akan berhak menjadi *asabah*. Adapun *dzaw al-arhâm* adalah orang-orang yang baru berhak mewarisi kalau golongan pertama dan kedua tidak ada<sup>37</sup>. Mereka ini adalah semua kerabat yang tidak termasuk dua golongan di atas tadi.

Berbeda dengan pendapat di atas, Hazairin yang dalam pengetrapannya teori kewarisan cucu ini mendasarkan pada pandangan

---

<sup>34</sup> Istilah *sunni* merupakan nisbat kepada pengikut ajaran tersebut. Sunni adalah nisbat kepada ahl al-Sunnah wa al Jama'ah. Sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk "mayoritas umat Islam" yang mengikuti dan meneruskan tradisi rasul dan shahabat, sebagai reaksi atas kemunculan "kelompok minoritas" yang sedikit banyaknya menentang kelompok mayoritas tersebut yaitu khowarij dan syi'ah. Abu Bakar, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-1, 1987, hlm. 17.

<sup>35</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Madzhab Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam*, Semarang: Sala: Ramadhani, 1980, hlm. 10.

<sup>36</sup> Ibnu Rusy dalam Bidayat mengatakan kewarisan di dalam Islam ada tiga yaitu: pertalian darah, perkawinan dan pemerdakaan budak. Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, Kairo: Al-Istiqamah, hlm. 333.

<sup>37</sup> Asal kata *al-arhâm* adalah dari *fi'il madhi* (فَعَّلَ) *rahima* yang berarti tempat janin dalam kandungan ibu, yang kemudian oleh bangsa arab dan bahasa *syara'* (pen: fiqh) kata tersebut dijadikan istilah dalam menyebut kerabat dekat baik dari ayah ataupun ibu. Lebih lanjut baca; Muhamad Ali Ash Shabuni, *Al-Mawâris fi al Syarî'at al Islâmiyyah fi Dhou' al Kitâb wa al Sunnah*, Makkah Mukarramah., 'Âlam al-Kutub, hlm. 165. Secara etimologi Wahbah Zuhaily mendefinisikannya yaitu orang yang mempunyai kerabat secara mutlak. Baik terhadap yang mempunyai bagian pasti, *asabah* atau lainnya. Wahbah al-Zuhaily, *op.cit*, hlm. 7850.

antropologi sosial Indonesia<sup>38</sup>, menyatakan bahwa penggantian kedudukan atau ahli waris pengganti sebenarnya sudah ada dalam al-Qur'an, yang disebut *mawâli*, disebut dengan penggantian kedudukan karena orang yang digantikan sekiranya tidak meninggal lebih dahulu berhak mendapat bagian warisan. Bagian warisan inilah yang pada saatnya akan diterima oleh ahli waris pengganti.

#### **D. Ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hukum kewarisan islam disamping memuat ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti, ada juga di antara mereka ahli waris yang tidak disebutkan secara pasti, seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 disebutkan bahwa : “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Dengan demikian, anak sebagai ahli waris pengganti menempati kedudukan sebagai ahli waris, sama dengan kedudukan yang digantikannya, yaitu kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu. Dengan demikian, berarti kedudukan ahli waris pengganti adalah sesuai dengan orang yang digantikan. Kalau ia menggantikan posisi bapaknya, berarti kedudukannya sebagai ahli waris anak laki-laki, dan

---

<sup>38</sup> Dr. Anwar Harjono, “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an; Komentar Singkat Atas Teori Prof. Hazairin”, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 62.

kalau ia menggantikan posisi ibunya, berarti kedudukannya sebagai ahli waris anak perempuan<sup>39</sup>.

Dalam hal ini, Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sudah lama dinantikan oleh umat Islam di Indonesia, karena ia merupakan payung hukum yang mengakui kedudukan dan hak ahli waris pengganti untuk menerima warisan dari perwaris. Hak mereka diakui sebagai ahli waris, karena menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal terdahulu sebelum pewaris meninggal. Dalam hal ini, nampaknya KHI berusaha, mengkompromikan secara bijaksana antar prinsip normatif dengan hukum adat Indonesia yang memberikan harta peninggalan kepada ahli waris pengganti<sup>40</sup>.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad fuqaha' Indonesia, telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan hak ahli waris pengganti. Para fuqaha' sudah mempertimbangkan nilai-nilai adat ('urf) yang berlaku dan hidup dalam masyarakat di Indonesia ketika mereka merumuskan hasil ijtihadnya, sehingga hal-hal yang sudah menjadi adat kebiasaan dan merupakan hajat orang banyak serta menjadi *maslahat*, kiranya telah menjadi pertimbangan mereka.

Dalam hal *ijtihâd*, Basyir mengemukakan, bahwa cara pokok berijtihad guna memelihara kepentingan hidup manusia dapat dijabarkan dalam berbagai cabang, seperti *maslahat mursalat*, *istihsan*, *istishab* dan

---

<sup>39</sup>ST. Rahmah, *op cit*, hlm. 12.

<sup>40</sup>*Ibid.*

mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan (*‘urf*)<sup>41</sup>. Sementara itu Rasyid Ridha dalam tafsirya Al-Mannar dipertegas Ahmad Raysuni dalam *al-ijihad*-nya menyatakan bahwa hukum itu dapat berubah atau berbeda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan keadaan. Suatu hukum dapat saja ditetapkan pada waktu yang sangat dibutuhkan. Apabila kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu yang lain, maka tindakan yang paling bijaksana adalah menghapuskan hukum itu dan menggantinya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai dengan waktu yang lain itu<sup>42</sup>.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti, adalah sebagai upaya untuk lebih mengukuhkan kemaslahatan umat Islam, atau dengan kata lain bahwa pelebagaan ahli waris pengganti sudah merupakan suatu tuntutan guna memenuhi rasa keadilan terhadap ahli waris (cucu) yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adanya penetapan penggantian ahli waris, bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan menerima warisan, sehingga ahli waris pengganti yang seharusnya tersingkirkan dari kewarisan itu dapat merasakan nikmatnya harta peninggalan dari kakek atau neneknya<sup>43</sup>.

Untuk membahas lebih lanjut hal ini, maka cara yang paling tepat adalah mengkaji secara umum tujuan hukum waris diadakan. Sebagaimana

---

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, “Pokok-pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (eds.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988, hlm. 49.

<sup>42</sup> Ahmad al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad; Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000, hlm. 46 dan 84.

<sup>43</sup> ST. Rahmah, *loc. cit.*



diketahui bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada manusia guna mengatur kehidupannya, termasuk mengatur tata cara perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan seadil-adil aturan<sup>44</sup>.

Hukum kewarisan yang diatur dalam Islam, selain mempertimbangkan rasa keadilan yang sangat tinggi, juga manfaat harta sebagai sarana mencegah anak cucu dari kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan dalam segala bidang kehidupan, Allah menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya takut akan hal-hal di atas, disebutkan dalam al-Quran:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿النساء : 9﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS. Al-Nisa’; 9)”*<sup>45</sup>

Oleh karena itu, memberikan harta kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal sebelum pewaris meninggal, merupakan tindakan yang sangat arif guna membantu mereka mengurangi segala tantangan hidup yang kelak mereka hadapi. Dengan demikian, pelembeagaan ahli waris

---

<sup>44</sup> Lebih lanjut baca dalam asas-asas kewarisan; Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 111.

<sup>45</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain, *op cit.*, hlm. 118

pengganti sudah menemui asas keadilan, sehingga rasanya sangat tidak adil jika seseorang memutuskan untuk tidak memberikan warisan kepada ahli waris pengganti yang semestinya diperoleh orang tuanya, hanya karena orang tuanya meninggal lebih dulu dari kakeknya.

#### 1. Pihak-pihak yang menjadi ahli waris pengganti

Pihak-pihak yang berhak menempati posisi ahli waris pengganti adalah mereka yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam al-Quran dan al-Hadits. Dan dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 185 tersebut, semua jenis cucu dan kemenakan mungkin mewaris, yaitu mewaris berdasarkan penggantian tempat atau *plaatsvervulling*.

Untuk mempermudah siapa saja yang berhak dapat menjadi ahli waris pengganti, Rachman Budiono menjelaskan dengan istilah penggantian tempat dalam garis lurus kebawah dan penggantian tempat dalam garis kesamping.

##### a. Penggantian tempat dalam garis lurus kebawah.

Penggantian tempat dalam garis lurus kebawah artinya adalah keturunan; anak, cucu, cicit dan seterusnya tanpa membedakan melalui anak laki-laki maupun perempuan, mereka adalah:

##### 1. Cucu laki-laki dari (garis) anak perempuan.

2. Cucu perempuan dari (garis) anak perempuan.
  3. Cucu laki-laki dari (garis) anak laki-laki
  4. Cucu perempuan dari anak (garis) laki-laki
- b. Penggantian tempat dalam garis kesamping.
1. Kemenakan laki-laki dari saudara perempuan kandung.
  2. Kemenakan perempuan dari saudara perempuan kandung.
  3. Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
  4. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung<sup>46</sup>

Namun, pembahasan kali ini penulis lebih menekankan pada kasus ahli waris pengganti yang lebih banyak kemungkinan terjadinya yaitu penggantian tempat dalam garis lurus kebawah (cucu).

## 2. Bagian-bagian ahli waris pengganti

Al-Qur'an telah menentukan bagian masing-masing ahli waris, mulai dari  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{2}{3}$  atau *ashabah*. Menurut ketentuan, bagian anak perempuan mendapatkan bagian bermacam-macam, yakni  $\frac{1}{2}$  apabila hanya sendiri,  $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih, dan *ashabah bil ghair* bila bersama anak laki-laki. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “anak perempuan bila

---

<sup>46</sup> A. Rachman Budiono, *op. cit*, hlm. 81-82.

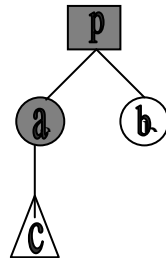
hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Adapun anak laki-laki menjadi *ashabah binafsih* jika hanya sendiri atau bersama dengan anak laki-laki yang lain, dan menjadi *ashabah bil ghair* bila bersama anak perempuan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185 (2), menyebutkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dengan demikian, bagian ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan pasti jumlahnya karena disesuaikan dengan jumlah bagian ahli waris yang digantikan.

Sebagai contoh, jika ahli waris pengganti menggantikan posisi anak laki-laki, sementara ahli waris pengganti tersebut menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki yang lain, maka ahli waris pengganti tersebut mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki pewaris yang lain yang bersamanya. Demikian juga kalau ahli waris pengganti menggantikan posisi anak perempuan, sementara ahli waris pengganti tersebut menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka ahli waris pengganti mendapat bagian separo dari bagian anak laki-laki pewaris yang lain yang bersamanya.

Untuk mempermudah pemahaman, di bawah ini digambarkan ilustrasi penggantian kedudukan<sup>47</sup>, dalam bentuk gambar sebagai berikut:

a.



Keterangan: p = pewaris     $\bigcirc$  = perempuan     $\triangle$  = laki-laki

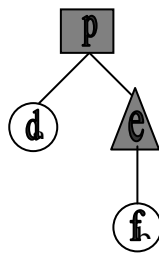
a = anak perempuan meninggal lebih dahulu

b = anak perempuan  $\frac{1}{2}$  + radd (pengembalian)

c = cucu laki-laki garis perempuan, *dzaw al-arhâm*.

Apabila diselesaikan dengan penggantian kedudukan atau *mawâli*, maka cucu laki-laki garis perempuan c, menerima  $\frac{1}{3}$  dan b menerima  $\frac{1}{3}$ .

b.



Keterangan: p = pewaris

d = anak perempuan menerima  $\frac{1}{2}$

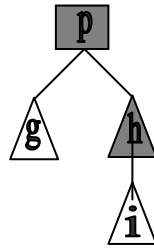
e = anak laki-laki meninggal lebih dahulu

f = cucu perempuan garis laki-laki  $\frac{1}{6}$

<sup>47</sup> A. Rofiq, *op. cit.*, 192-195

Apabila diselesaikan dengan penggantian kedudukan maka: d menerima  $\frac{1}{3}$  dan f menerima  $\frac{2}{3}$  (bagian maksimal) laki-laki menerima dua bagian perempuan.

c.



Keterangan: p = pewaris

g = anak laki-laki menerima seluruh harta

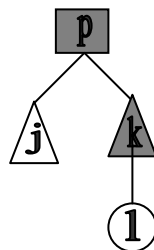
h = anak laki-laki meninggal lebih dahulu

i = cucu laki-laki garis laki-laki mahjub.

Jika diselesaikan menurut penggantian kedudukan, maka:

g = menerima  $\frac{1}{2}$  dan i = menerima  $\frac{1}{2}$ .

d.



Keterangan: p = pewaris

j = anak laki-laki menerima seluruh harta

k = anak laki-laki meninggal lebih dahulu

l = cucu perempuan garis laki-laki mahjub.

Jika diselesaikan menurut penggantian kedudukan, maka:

j = menerima  $\frac{1}{2}$  dan l = menerima  $\frac{1}{2}$ .

**BAB III**

**PERSPEKTIF ULAMA' SYURIAH NU JAWA TENGAH MASA**

**KHIDMAT 2006-2008 TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS**

**PENGGANTI**

**A. Profil Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah tahun 2006-2008**

Mendeskripsikan ulama' Syuriah NU Jawa Tengah tergambar dalam benak sebuah organisasi keagamaan yang beraliran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dengan puluhan juta anggota dan simpatisannya yang berinisial NU —kepanjangan— Nahdhatul Ulama' yang berlambangkan bola dunia bertuliskan Nahdhatul Ulama' berbahasa arab dengan ornamen yang melengkapi dan menghiasinya. NU tidak saja sebuah perkumpulan keagamaan, tetapi juga sebuah pergerakan ulama' dan wadah perjuangan para kiai dan ulama'-ulama'. Namun NU juga dikenal sebagai organisasi nasional yang memiliki integritas *diniyyah* yang tinggi dan mempunyai loyalitas nasional kepada negara di mana ia dilahirkan dan bertumbuh kembang.

Sadar akan pentingnya sebuah posisi dan peran NU dalam keberagaman dan kebangsaan, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu apa organisasi NU dan siapa ulama' Syuriah NU itu sendiri, sebelum lebih lanjut membincang tentang profil ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008.

Dalam setiap organisasi —termasuk di tubuh NU— agar tanggungjawab berorganisasi dapat berhasil, sukses, berdaya guna dan berhasil guna, maka niat dan tujuan yang *khair* perlu diorganisir. (الحق بلا )

(نظام يغلبه الباطل بنظام) Kebenaran yang tidak diorganisir akan dikalahkan oleh ketidakbenaran yang diorganisir rapi, begitu ungkapan terjemahan dari motto berbahasa arab yang sering diungkapkan oleh para kiai<sup>1</sup>.

Agar NU —organisasi yang diprakarsai oleh para kiai dan ulama'— benar-benar dikendalikan oleh para kiai<sup>2</sup>, organisasi kaum ortodok<sup>3</sup> ini lurus, maka ada dua lembaga yang disebut yang diharapkan mampu membawa Nahdhatul Ulama' kedepan lebih cemerlang, yaitu Syuriah (permusyawaratan ulama') dan Tanfidziyah (pelaksana kebijakan ulama')<sup>4</sup>.

Syuriah yang terdiri dari kiai dan ulama' merupakan institusi tertinggi dalam NU. Syuriah merupakan penanggungjawab seluruh urusan

---

<sup>1</sup> Abdul Karim Husain, *NU Menyongsong Tahun 2000*, Kendal: CV. MA Noer Ghamid, 1989, hlm. 5

<sup>2</sup> Sebutan yang diberikan bagi kaum ulama' di Jawa. Atau orang-orang yang dihormati karena karisma dan pengetahuan agama islam mereka. Perlu digaris bawahi bahwa penggunaan istilah kiai telah mengalami perubahan arti: istilah ini semakin gampang dipergunakan sebagai ungkapan rasa hormat, bahkan terhadap yang masih muda dan belum tentu mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Andree Feillard, *NU Vis-à-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Terj. *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 463.

<sup>3</sup> Ortodok berasal dari kata *orthos* yang berarti lurus, lempang, dan *doxa* berarti jalan. Kemudian dalam bahasa arab sering disitilahkan dengan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Lawannya *Hetherodox*, *Hethero* berarti bengkok, menyimpang atau *ahl bid'ah*. *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



organisasi. Semua keputusan Syuriah dilaksanakan oleh Tanfidziyah yang terdiri dari bidang pengajaran, logistik, dakwah dan sosial ekonomi<sup>5</sup>.

Pengejawentahan rasa tanggungjawab berorganisasi ini dibuktikan oleh para kiai dengan membahas secara mendalam setiap langkah yang ditempuh, termasuk bidang keagamaan. Dalam hal bidang keagamaan ini, NU menjadikan motif keagamaan sebagai pola dasar perjuangan NU (khittah1926), yaitu wawasan keagamaan yang sudah melembaga dan membudaya sehingga merupakan rangkaian yang membentengi NU dari segala goncangan.

Dalam khittah NU dijelaskan bahwa NU didirikan karena motif keagamaan, bukan motif politik, ekonomi, dan sebagainya. NU berlandaskan agama sehingga segala sikap, tingkah laku dan karakteristiknya selalu disesuaikan dan diukur dengan norma hukum dan ajaran agama. NU bercita-cita keagamaan, yaitu *izzul al-islâm wa al-muslimîn* (kejayaan islam dan kaum muslimin) menuju *rahmatan li al-âlamîn* (rahmat bagi seluruh alam)<sup>6</sup> atau tercapainya *sa'âdat al-dârain* (bahagia dunia dan akhirat)<sup>7</sup>.

Kegiatan NU diarahkan pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan keagamaan, seperti masalah '*ubudiyyah* (ibadah),

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 346.

<sup>7</sup> Dalam pengantar KH. Sahal Mahfudl pada buku Quo Vadis NU. Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Khittah 1926*, Bandung: Erlangga, 1992, hlm. ix.

*mabarrat* (sosial), *da'wah* dan *ma'ârif* (ilmu pengetahuan) dan *mu'amalah* (sosial kemasyarakatan)<sup>8</sup>.

Dengan mengetahui peranan NU dan kepengurusannya yang memasukkan ulama' Syuriah di dalamnya sebagai dewan agama, secara umum ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 adalah tidak jauh berbeda peranannya dalam merealisasikan tanggungjawab yang telah diamanatkan kepadanya.

Kemudian, pada dasarnya kepemimpinan organisasi NU mempunyai perangkat organisasi yang sama, hanya saja yang membedakan adalah pada tingkatan daerah atau wilayah yang dibawahinya yaitu Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkatan pusat, Pimpinan Wilayah (PW) untuk tingkatan Propinsi, Koordinator Daerah (Korda) untuk tingkat eks Karisedenan, Pimpinan Cabang (PC) untuk tingkat kabupaten atau Kota madya, Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk tingkat Kecamatan dan Pimpinan Ranting (PR) untuk tingkat desa atau kelurahan<sup>9</sup>.

Adapun Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah merupakan lembaga PWNU yang kiprahnya membawahi wilayah propinsi Jawa Tengah. Jadi ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 merupakan kumpulan (*jam'iyyah*) ulama'<sup>10</sup> wilayah Jawa Tengah masa khidmat dari tahun 2006 sampai 2008 setelah mengalami pergantian kepengurusan yang

---

<sup>8</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 349.

<sup>10</sup> Ulama' adalah orang tahu, memiliki pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan keagamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Kata ulama' merupakan bentuk jama' dari kata 'âlim yang mempunyai arti tahu atau mempunyai pengetahuan. *Ibid*, vol 3, hlm. 120.

seharusnya dari tahun 2004 – 2008, mereka mempunyai potensi, kewibawaan dan pengaruh ulama' yang demikian membudaya yang kemudian dikonkritkan secara formal organisatoris pada struktur kepemimpinan NU dalam lembaga Syuriah NU Jawa Tengah.

Dengan identitasnya seperti di atas, di mana ulama' Syuriah NU Jawa Tengah tidak hanya sekadar simbol kharismatik yang menjalani organisasi struktural, tetapi lebih dari itu adalah sebagai lembaga yang mengemban posisi kunci pada NU tingkat Jawa Tengah yang menjadi lembaga tertinggi (*dewan legislatif*) yang mengemban wewenang untuk membina, membimbing dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi<sup>11</sup>. Sedangkan lembaga di bawahnya, Tanfidziyah sesuai dengan namanya berfungsi melayani dan melaksanakan petunjuk serta kebijaksanaan Syuriah<sup>12</sup>.

Lebih lanjut wewenang ulama' Syuriah dipertegas sesuai dengan pengendali Nahdhatul Ulama' dengan rumusan<sup>13</sup>:

1. Bahwa pengurus Nahdhatul Ulama' di semua tingkatan adalah pengurus Syuriah.

---

<sup>11</sup> Dalam Anggaran Rumah Tangga NU, selalu dirumuskan tugas dan kewenangan Syuriah, sebagai berikut: 1- setiap awal tahun hijriyyah memberikan pengarahan dalam rapat pleno untuk menjabarkan program tahunan, 2- setiap akhir tahun hijriyyah menerima dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh Tanfidziyyah, 3- memberikan teguran, saran dan bimbingan kepada seluruh perangkat organisasi, 4- berhak membatalkan segala keputusan atau kebijaksanaan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ajaran islam. Slamet Effendy Yusuf, *et al.*, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak da Pergolakan Internal NU*, ..... : CV. Rajawali, 1983, hlm. 23.

<sup>12</sup> Kacung Marijan, *op cit*, hlm. xiii. Baca; Sudirman Tebba, "Restrukturisasi Kepengurusan NU" dalam Marzuki Wahid, Abd. Moqsith Ghazali, Suwendi (*ed.s*), *Geger di "Republik" NU Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1999, hlm. 251.

<sup>13</sup> A. Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Kontektual*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994, hlm. 91.

2. Bahwa yang dipilih oleh musyawarah (melalui dari muktamar sampai Rapat Anggota) hanyalah pengurus Syuriah.
3. Bahwa pengurus pelaksana (Tanfidziyah) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Syuriah dengan mempertimbangkan hasil musyawarah.

Dengan statemen sedemikian rupa mengilustrasikan karakter hubungan antara Syuriah NU Jawa Tengah dengan Tanfidziyah yang sesungguhnya juga berpangkal dari tradisi pesantren, di mana para santri atau pengurus pesantren sangat menekankan sifat tunduk dan khidmat pada kiai dan ulama' pengasuhnya<sup>14</sup>.

Adapun susunan kepengurusan ulama' Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama' Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 sesuai dengan Surat Keputusan PB. NAHDHATUL ULAMA', Nomor: 635. b / A.II.03.04.d / 03 / 2006, tentang Pengesahan PWNU Propinsi Jawa Tengah antar waktu masa khidmat 2006-2008, adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

#### **SUSUNAN PWNU PROPINSI JAWA TENGAH ANTAR WAKTU**

Masa Khidmat 2006-2008

**MUSTASYAR**

KH. Dr. M. A. Sahal Mahfudh

KH. Maimun Zubair

KH. Muntaha Al Hafidz

---

<sup>14</sup> Kacung Marijan, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Surat Keputusan PB. NAHDHATUL ULAMA', Nomor: 635. b / A.II.03.04.d / 03 / 2006, tentang Pengesahan PWNU Propinsi Jawa Tengah antar waktu masa khidmat 2006-2008, Photo copy terlampir.

KH. Habib Luthfi bin Yahya

KH. Wildan Abdul Hamid

Drs. KH. Syamsuddin Anwar

Prof. DR. H. A. Qodri abdillah Azizy, MA

## **SYURIAH**

### **Rais**

Wakil Rais

### **KH. Masruri Mughni**

KH. Abdul Wahid Zuhdi

Drs. Ems. Najib Hasan

DR. KH. Musthofa Shonhaji, MA

KH. Muromi

KH. Muhammad Zuhri Ihsan

KH. A'wani

### **Katib**

Wakil Katib

### **KH. Ubaidullah Shodaqoh, SH**

DR H Ahmad Hakim, MA

KH. Affuddin Hanif

KH. Mukhlas Hasyim, MA

Drs. KH. Mubin Shoimuri

Drs. Said Abdurrahim

### **A'wan**

KH. Adzro'i

KH. Hanif Muslih, Lc.

KH. Musyafa' Ahmad

Drs. Noor Ahmad, MA

KH. Zaini Mawardi	Drs, Hisyam Ali
KH. Ni'am Zuhri	H. Habib Umar Muhahar, SH
Prof. DR. H. Abdul Jamil, MA	Drs. H. Syamsyuddin Asyrofi, M. Hum.
KH. Muzani	KH. Khafidzin AH. Mahdum
KH. Abdul Rozaq, Lc	KH. Rofi'i
KH. Anik Muhammadun	Drs. H. Nafis Junalia, MA
KH. Zuhrol Anam	

### **TANFIDZIYAH**

#### **Ketua**

**Drs. H. Muhammad Adnan, MA**

#### **Wakil ketua**

Drs. H. Ali Mufiz, MPA

Drs. H. Abu Hapsin Umar, Ma, Ph.D

KH. Ahmad. Nurcholis Ali

DR. H. Mudjahirin Thohir, MA

H. Imam Syafi'i SE, MM

Drs. Slamet Hambali

KH. Ali Mahsun, S. Ag

Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag

#### **Sekretaris**

**Drs. Najahan Musyafak, MA**

#### **Wakil Sekretaris**

Drs. H. Aufarul Marom. M. Si

Drs. H. Fathuddin Yusuf

Drs. Taufiq CH, M. Hum

Drs. H. Mudzakkir Ali, MA

**Bendahara**

**HM. Ngadiyono**

Wakil bendahara

Drs. H. Abdillah Arwani

Suryanto Dwi Cahyo, Se

Ir. H. Yoga Pramudhita, MM

**Dr.KH.M.A. Sahal Mahfudh**

*Rais Aam*

**Prof. DR.H.Nasarudin Umar.MA**

*Katib Aam*

**H.A Hasyim Muzadi**

*Ketua Umum*

**Dr. Endang Turmudzi, MA**

*Sekretaris Jenderal*

Demikian susunan kepengurusan ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 yang telah mengalami perubahan antar waktu dari masa khidmat yang sebenarnya tahun 2004 sampai 2008 dikarenakan adanya anggota pengurus yang berhalangan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan PB. NAHDHATUL ULAMA', Nomor: 635. b / A.II.03.04.d / 03 / 2006, tentang Pengesahan PWNU Propinsi Jawa Tengah antar waktu masa khidmat 2006-2008.

#### 1. Otoritas keilmuan Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008

Menyebut ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 pada ruang dan *event* apapun selalu terkafer sebuah NU organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia yang terdiri dari

perkumpulan para ulama' dan para santri di lingkungan pesantren <sup>16</sup>. Begitu pula “*back ground*” ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 yang rata-rata dari kalangan pesantren.

Berbicara ulama' dan kaum santri dalam NU, mempunyai konotasi pada ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008, artinya tidak terlalu jauh menyimpang dari bibliografi keilmuan dan keulama'annya. Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 di dalam NU memberikan ciri deferensiasi tersendiri yang menjadi salah satu unsur pembeda dari fenomena organisasi Islam selain NU. Demikian penting dan sentralnya kedudukan ulama' di dalam organisasi bukan hanya karena sebagai pemrakarsa keberlangsungan organisasi, tetapi juga karena otoritas tradisional yang melekat pada keberadaan dan kemandirian ulama'. Sehingga kehadiran NU sebagaimana telah disinggung penulis di atas bahwa *Jam'iyah Diniyyah* yang bermotif keagamaan sudah semestinya menjadikan agama sebagai landasan sikap, perilaku, dan karakteristik perjuangannya' disesuaikan dengan norma-norma ajaran agama islam menurut paham *ahl al- sunnah wa al-jama'ah*<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Greg Fealy, Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan NAHDHOTUL ULAMA-NEGARA*. Terj. LKiS " *Nahdhotul Ulama' Tradisional Islam and Modernity in Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-1, 1997, hlm. 35. baca ; Jajat Burhanuddin, Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 31.

<sup>17</sup> Rozikin Dawan, *Membidik NU Dilema Percaturan politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 47.



Pada hakikatnya Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 sama halnya dengan ulama' NU pada umumnya yang berjasa pada masa silam. Artinya untuk bidang keilmuan khususnya keilmuan dan literatur keagamaan mereka mengikuti ideologi faham *ahl al- sunnah wa al-jama'ah* yang mana para kiai dan ulama tersebut dalam beragama berpedoman kepada al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan Qiyas. Untuk bidang Tauhid (*teologi*) berpedoman kepada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Untuk bidang Fiqh (hukum Islam) berorientasi sunni<sup>18</sup>. Tasawuf ditetapkan aliran-aliran yang mu'tabar. Sedang pengetahuan yang lain pada dasarnya berprinsip kepada pola pikir tersebut<sup>19</sup>.

Bidang-bidang yang terakomodasi dalam NU semuanya sejak era berdirinya organisasi konservatif<sup>20</sup> ini, bahkan sampai sekarang masih menjadikan pesantren sebagai sentral pengkaderan dan "kawah candradimuka"-nya para kiai dan ulama'.

Lebih lanjut ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang otoritas keilmuannya telah diakui di lingkungan mereka atas kemampuan

---

<sup>18</sup> Katib Syuriah NU Jawa Tengah KH. Ubaidullah Sodaqoh menguatkan pernyataan ini, karena memang ulama' NU adalah mengikuti faham ahl al-sunnah wa al-jama'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat yang mashur, Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *katib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 07 Juni 2006.

<sup>19</sup> Abdul Karim Husain, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>20</sup> Tentang mengapa ulama' NU sampai kepada sebutan konservatif karena kiprahnya pendidikannya yang masa itu masih di pesantren yang sangat toleran dengan tradisi keagamaan local selama tidak bertentangan dengan ajaran islam. Baca lebih lanjut, Mujamil Qomar, *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002, Cet ke-1, hlm. 26.

dalam memahami literatur kagamaan, maka sangat relevan apabila ulama' Syuriah NU Jawa Tengah sebagai badan legislatif berwenang menetapkan keputusan atas masalah-masalah keagamaan yang menuntut pengetahuan khusus mengenai fiqh<sup>21</sup>.

Seperti KH. Wahid Zuhdi, wakil *ra'is* syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 dimana keilmuannya yang sejak kecil telah tampak, yaitu masa kecil ia belajar bersama ayahandanya tokoh NU daerah Grobogan Jawa Tengah, setelah tamat Sekolah Rakyat (setingkat dengan SD) kemudian melanjutkan studi agama (nyantri) ke Kiai Zubair tepatnya Pondok Pesantren di daerah Sarang yang sekarang diasuh oleh KH. Maemun Zubair. Selama kurang lebih tiga tahun ia belajar, melanjutkan pendalaman kajian islam ke Saudi Arabia. Di sana beliau menimba ilmu bidang fiqh kepada Syekh Ismail seorang mufti, dan bidang hadits kepada syekh Muhammad, lengkapnya al-Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky al-Hasany, disamping seorang mufti juga tokoh terkemuka yang sebagian besar ulama' Indonesia termasuk ulama'-ulama' syuriah NU Jawa tengah, mereka menyerap ilmu kepada beliau. KH. Wahid Zuhdi sekarang pengasuh pondok pesantren *salâfiyyah* Al-Ma'ruf yang beraliran *ahl al- sunnah wa al-jama'ah* dan bercorak ke-NU-an<sup>22</sup>. Dikalangan para ulama dan Syuriah NU Jawa Tengah KH. Wahid Zuhdi yang selalu menjadi

---

<sup>21</sup> Lebih lanjut baca; Andree feillard, *op cit*, hlm. 14.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 07 Juni 2006.

rujukan dalam masalah-masalah keagamaan (*diniyyah*) bahkan sosial keagamaan<sup>23</sup>.

KH. Ubaidullah Shodaqoh, SH, *kâtib* Syuriah NU Jawa Tengah, disamping keilmuannya yang didapatkan dari ayahnya yang sekaligus pembentuk karakteristik keilmuan dan keulamaannya beliau juga sempat melanjutkan ke Universitas Tujuh Belas Agustus dengan konsentrasi hukum sebagai fakultas pilihannya dengan gelar sarjana yang telah disandang semenjak kelulusannya tahun 1992. KH. Ubaidullah Shodaqoh yang semenjak mudanya aktif di kepengurusan NU tidak lapuk oleh panasnya modernitas dan derasny arus reformasi sampai sekarang masih teguh menjalankan amanat organisasi keagamaan sebagai *kâtib* NU Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008<sup>24</sup>.

Tidak hanya tokoh-tokoh ulama' di atas yang jejaknya dapat penulis ungkapkan dalam karya ilmiah ini, melainkan ulama' Syuriah lainpun sealiran dengan mereka, semisal KH. Muhammad Zuhri Ihsan ulama' asal Kaliwungu Jawa Tengah, Drs. Najib Hasan dari Kudus, KH. A'wani asal Lodan Rembang Jawa Tengah dan lain sebagainya, mereka semua berlatar belakang dari pesantren dan kembali meng-  
“*openi*” pesantren. Sehingga otoritas pengetahuan agama, tauhid dan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan KH. Najib Hasan, wakil *ra'is* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008, tanggal 9 Juni 2006.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 23 Juni 2006.

bahasa arab sudah mutlak melekat. Walaupun pada sisi lain, kenyataannya pemahaman mereka dibidang tersebut sangat bervariasi<sup>25</sup>.

Demikian berdasarkan perjalanan keilmuan, keulamaan dan kharisma ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 mempunyai kekuatan supranatural menjadikan sumber legitimasi dan eksistensi<sup>26</sup> otoritas keulama'annya bersifat mutlak dan sebagai penyandang predikat dewan agama<sup>27</sup>.

2. Afiliasi bermadzhab Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah tahun 2006-2008.

Sejak awal NU menegaskan bahwa ia merupakan penganut *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, sebuah paham keagamaan —yang dikalangan NU— bersumber pada: *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyâs*. Karena hendak mempertahankan dan mengembangkan idiologi (ajaran) demikian<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Lihat, Greg Fealy, *Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdhotul Ulama' 1952-1967*, terj. LKiS, Ijtihad politiks Ulama Sejarah Nahdhotul Ulama' 1952-1967, Yogyakarta: LKiS, 1998, hlm. 23.

<sup>26</sup> Laode Ida, "Kelompok Progresif di Tengah NU", dalam Elyasa KH. Darwis, Sayed Mahdi (eds.), *NU Muda:Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 3.

<sup>27</sup> Prajarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 206.

<sup>28</sup> Kacung Marijan, *op cit.*, hlm. 21.

Secara harfiyyah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* berarti penganut sunnah nabi Muhammad SAW dan jama'ah (sahabat-sahabatnya)<sup>29</sup>. Secara ringkas berarti segolongan pengikut sunnah (jejak) Rasulullah SWT yang di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya beliau berjalan diatas garis yang dipraktekkan oleh jama'ah (sahabat nabi)<sup>30</sup>. Secara rinci —dan ini yang dianut ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008— mengartikan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai faham yang berpegang teguh pada tradisi pemikiran dan menggunakan jalan pendekatan (*al-madzhah*) sebagai berikut<sup>31</sup>:

a. Dalam bidang Hukum islam (tradisi pemikiran fiqh)

Dalam bidang hukum-hukum islam, menganut ajaran-ajaran dari salah satu Imam Madzhab Empat (Abu Hanifah al-Nu'man, Imam Malik In Abbas, Imam Muhammad ibn Idris al-syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal), yang dalam praktek para kiai adalah penganut kuat madzhab Syafi'i<sup>32</sup> yang terkenal ajarannya yang moderat.

---

<sup>29</sup> Lihat Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunah wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983, hlm. 16.

<sup>30</sup> Kacung Marijan, *Ibid.* Baca: Saifuddin Zuhri, *Menghidupkan Nilai-Nilai Ahlussunah wal Jamaah*, Jakarta: PP IPNU, 1976, hlm. 15.

<sup>31</sup> Kacung Marijan, *Ibid.* lihat Rozikin Dawam, *op cit.*, hlm. 60. Lihat juga, Greg Fealy, *op cit.*, hlm. 25.

<sup>32</sup> Kitab-kitab rujukan yang diajarkan pada para santri diutamakan pada kitab-kitab Syafi'iyah. Sampai saat penulisan karya tulis ini penulis menerima akan informasi pernyataan ini dari sambutan Rais Syuriah NU Jawa Tengah, KH. Masruri Muhgni pada Musyawarah Kerja Wilayah PWNU di Semarang 14 Juni 2006. dan Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 07 Juni 2006. sampai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ketika diajukan kepada KH Wahid Zuhdi (kiai pemegang otoritas bidang fiqh di tubuh ulama' Syuriah NU Jawa Tengah) menetapkan tetap mengikuti kitab-kitab

- b. Dalam bidang soal-soal tauhid (tradisi pemikiran akidah).

Dalam bidang akidah, tauhid (*theologi*) Nahdhatul Ulama' menganut ajaran-ajaran yang dipelopori Abu Hasan Al-Asy'ari (873-935) dan urutan berikutnya mengikuti imam Abu Mansur Al-Maturidi (wafat 944).

- c. Dalam bidang tasawwuf (tradisi pemikiran sufisme)

Dalam bidang tasawuf merujuk dan menganut dasar-dasar ajaran tasawuf terutama Imam Abu Qosim al-Junaidi al-Baghdadi (meninggal tahun 911 M) dan Imam Al-Ghazali (1058-1111 M) dan imam yang lain.

Jadi, dalam kotek ini ulama' Syuriah NU Jawa Tengah periode 2006-2008 dapat dikatakan *sokoguru* dan kekuatan sentralnya kaum muslim pengikut ajaran ahl al- sunnah wa al-jama'ah memiliki karakteristik dan corak bermadzhab mengikuti Imam Mujtahid Mutlaq yang telah diakui kemampuannya mengeluarkan *ijtihâd* dan *Istinbâth*.

3. Manhaj *Istinbâth* hukum Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah tahun 2006-2008.

Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dengan menganut salah satu dari madzhab empat dalam fiqh, dan NU

---

mu'tabarrah dari syafi'iyah. Hasil wawancara dengan KH. Wahid Zuhdi wakil *ra'is* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 24 Juni 2006.

sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar ‘bermadzhab’. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqh dari referensi (*marâji’*) berupa kitab-kitab fiqh (*al-kutub al-mu’tabarât*)<sup>33</sup> yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: ‘*ibâdat, mu’âmalat, munâkahat* (hukum keluarga) dan *jinâyat* atau *qadhâ’* (pidana atau peradilan)’<sup>34</sup>.

Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum dalam bermadzhab yang ditetapkan NU mengikuti dua metode yang pertama, mengikuti secara *qawli*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ‘jadi’ dalam lingkup aliran atau madzhab tertentu. Dan kedua, secara *manhaji*, bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaedah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab<sup>35</sup>.

Dalam hal ini para ulama’ dan forum *bahts al-masâil*<sup>36</sup> mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum (metode *ijtihād* atau *istinbâth*) kepada *aqwâl al-mujtahidîn* (pendapat para mujtahid)

---

<sup>33</sup> Dalam keputusan Musyawarah Nasional ‘alim ulama’ Nahdhatul Ulama’ nomor I/MAUNU/1404/1983, tentang hukum atas beberapa masalah *diniyyah* mensahkan bahwa *al-kutub al-mu’tabarât fî al-masâil al-diniyyah* ‘indanâ ialah kitab-kitab ‘*alâ al-madhâhib al-arba’ah*. Lihat, Nahdhatul Ulama’ (Pengurus Besar NU), *Nahdhatul Ulama’ Kembali Khittah 1926*, Bandung: Risalah Bandung, 1984, cet ke-1, hlm. 42.

<sup>34</sup> Djamaluddin Miri (penerj), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhotul Ulama’ (1926-1999)*, Jawa Timur: Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU, 2005, cet. ke-2, hlm. ix.

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2002, hlm. 179.

<sup>36</sup> Forum yang memutuskan sebuah hukum yang dikoordinasi oleh lembaga syuriah (legislatif) baik yang berkaitan dengan *masâil fiqhiyyah* (masalah fiqh) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah *tasawuf* (tarekat). Forum ini biasanya juga diikuti ulama’ di luar struktur organisasi. *Ibid.*, Hlm. x.

yang *mutlaq* maupun *muntasib*<sup>37</sup>. Apabila kebetulan diketemukan *qawl manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharrij* (pendapat hasil *takhrij*). Bila terjadi *khilâf* (perbedaan pendapat) maka diambil pendapat (*wajh*) yang paling kuat sesuai dengan pen-*tarjih*-an ahli *tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam *khilâf* akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyyah tahsiniyyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyyah* (kebutuhan primer)<sup>38</sup>.

Demikian apabila pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) dalam kitab-kitab standard (baik *qawli* maupun *wajah*), dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhâq*, karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhâq*, maka langkah yang ditempuh adalah *istinbâth* secara *jamâ'i* (kolektif) dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya<sup>39</sup> dengan mengaplikasikan kaidah *usûl* dan kaidah *fiqh*.

---

<sup>37</sup> Arti dari *mujtahid mutlaq mustaqîl* adalah mujtahid (pelaku ijtihad) yang sudah demikian tinggi kemampuan ijtihadnya sendiri, tetapi sekaligus juga mampu menciptakan pola atau metoda ijtihadnya sendiri. Dia adalah pembangun madzhab. Sedangkan *mujtahid muntasib* (terbatas atau relatif) adalah mujtahid yang kemampuannya masih terbatas (relatif), masih menggunakan pola atau metoda yang diciptakan atau dirumuskan oleh mujtahid lain (yang *mutlaq mustaqîl*). Imam Ghazali misalnya, sudah tergolong mujtahid, tetapi masih menggunakan metoda ijtihadnya Imam Syafi'i, maka Imam Ghazali disebut *mujtahid muntasib ila al-Imam al-Syafi'i* (berhubungan dengan madzhab Imam Syafi'i). A. Muchit Muzadi, *op cit.*, hlm. 9.

<sup>38</sup> Djamaluddin Miri, *op cit.*, hlm. ix.

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, *op cit.*, hlm. 181



**B. Perspektif Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah tahun 2006-2008 terhadap ahli waris pengganti**

Setelah mengetahui perjalanan otoritas keagamaan (*sulthah dîniyyah*), bermadzhah dan metode *istinbâth* hukum ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008, maklum bahwa mereka memiliki kesamaan eksistensi terhadap ulama' Syuriah NU pada umumnya. Artinya mereka adalah komunitas ulama'-ulama' NU yang berafiliasi madzhah dari idiologi *ahl al- sunnah wa al-jama'ah* yang menjadikan madzhah Syafi'i sebagai jalan pendekatan berfikir dalam bidang hukum islam (*fiqh*) atas permasalahan-permasalahan yang muncul baik bersifat *waqi'i* (aktual) maupun *maudhû'i* (tematik). Hal ini mereka mendasarkan pada pernyataan ulama' sebagai berikut:

اعلم أنه لا بد لمكلف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين من

مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع الإجتihad<sup>40</sup>

Artinya: Ketahuilah, bagi orang mukallaf, selain mujtahid mutlak harus selalu mengikuti pendapat (*taqlid*) kepada madzhah tertentu dari madzhah empat yang ada dalam masalah-masalah *furu'iyah* *ijtihâdiyyah*

Dan perlu diketahui, bagaimana ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 menanggapi permasalahan —yang penulis

---

<sup>40</sup> 'Alawy ibn ahmad al Syegaf, *Tarsyikh al Mustafidîn 'ala Syarh Fath Mu'in*, Surabaya: Syirkah Bunkul Indah, TT, hlm. 3

ajukan— tentang ahli waris pengganti. Penulis disamping menanyakan dengan wawancara langsung —menggunakan pertanyaan yang telah tersusun— kepada mereka ulama' Syuriah NU Jawa Tengah yang mempunyai otoritas keilmuan bidang fiqh yaitu KH. Wahid Zuhdi, juga kepada ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 yang lainnya, sebagai bahan jawaban penulis menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana terlampir.

Mereka ulama' syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008, dari pertanyaan dan pernyataan tentang apakah ulama' syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 mengenal konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam, yang dalam kasusnya adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan menggantikan anak yang meninggal terlebih dahulu dan masih ada ahli waris anak yang lainnya, mereka masih berkiblat pada literatur fiqh kewarisan yang dikembangkan oleh *ahl al-sunnah* (sunni)<sup>41</sup> yaitu dari Al-Qur'an yang sudah menentukan bagian-bagian (*al-furûdl al-muqadarah*) ahli waris secara jelas<sup>42</sup> dan al-sunnah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan *ijtihâd* Zaid bin Tsabit yaitu mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya hanya dipandang sebagai ahli waris *dzaw al-arhâm*, yang mereka semuanya tidak

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *Kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 23 Juni 2006.

<sup>42</sup> Ibrahim Al Baijuriy, *Hasyiyyah Al Baijûri*, jilid II, Bairut Libanon: Dâr al Fikr, 1982, hlm. 780

menerima harta warisan. Cucu laki-laki atau perempuan melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup dikarenakan mahjub<sup>43</sup>.

(فصل في بيان من يقوم مقام غيره فالإرث) ابن الإبن كالإبن إلا أنه ليس له مع البنات مثلاً لأنه لا يعصبها (والبنت الإبن كالبنات إلا أنها تحجب بالإبن) لأنه أقرب منها وهو عصبه.<sup>44</sup>

Artinya: (Pasal; Penggantian tempat dalam kewarisan) cucu laki-laki seperti anak laki-laki dalam mendapatkan warisan apabila tidak bersama anak perempuan lainnya karena ia tidak dapat menjadi ashabah, dan cucu perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan terhalang oleh anak laki-laki. Dikarenakan anak laki-laki lebih dekat dan ia sebagai ahli waris ashabah.

فصل, ولاترث بنت الإبن مع الإبن ولا الجدة أم الأب مع الأب لأنها تدلى به ومن ادلى بعصبه لم يرث معه كابن الإبن مع الإبن.....<sup>45</sup>

Artinya: Pasal, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak dapat mewaris ketika bersama anak laki-laki dan tidak dapat mewaris nenek (ibu dari bapak) apabila ada bapak karena posisi yang jauh dari pada bapak. Ahli waris yang lebih jauh posisinya untuk mendapatkan ashabah maka tidak dapat mewaris. Seperti cucu laki-laki bersama anak laki-laki.....

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan KH.Abdul Wahid Zuhdi, wakil ra'is ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2006. baca;

<sup>44</sup> Abdullah ibn Hijâzy ibn Ibrahim al Syafi'i al Syarqawy, *Hâsiyyah al Syarqâwy*, Juz II, Bairut Libanon: Dâr al Fikr, 1982, hlm. 198. lihat juga ; Abu Bakar Utsman Syatha, *Hasyiyyah l'anat al Thalibîn*, Bairut Libanon, Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1995, hlm. 398-399.

<sup>45</sup> Al Syairazy, *Al Muhadzdzab*, Juz II, Bairut Libanon, Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1995, hlm. 412.

Alasan mereka ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 oleh Wahid Zuhdi dikatakan masih mengikuti fiqh kewarisan islam yang telah dianutnya dalam kitab-kitab fiqh klasik *mu'tabar* yang berhaluan pada madzhab Syafi'i. Dan masalah faro'id adalah terakumulasi ke dalam masalah-masalah yang sudah *patent* sehingga rujukan (*term of reference*) pun mengacu pada kitab-kitab fiqh yang telah mereka kembangkan sebagai ajaran bermadzhab<sup>46</sup>.

Jadi dengan mengikuti komentar dan pernyataan dari ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dapat disimpulkan bahwa mereka sejalan dengan tidak adanya istilah penggantian kedudukan atau ahli waris pengganti dari cucu yang menggantikan posisi anak yang telah meninggal terlebih dahulu sebagaimana pendapat kebanyakan ulama' sunni.

*Kâtib* Syuriah KH. Ubaidillah Shadaqah, SH lebih lanjut menegaskan dengan tidak adanya konsep ahli waris pengganti dalam fiqh kewarisan islam merupakan *hikmat* dan syari'at tersendiri dalam mengurus anak yatim (cucu yang ditinggal orang tuanya lebih dahulu) dengan intensif<sup>47</sup>, dengan dalih bahwa ayat kewarisan yang maktub dalam surat al-nisa' ini sangat terkait dengan ayat kasih sayang dan anjuran prioritas perhatian terhadap anak-anak yatim. Dan hal ini dibenarkan dan oleh KH. Najib Hasan.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan KH. Abdul Wahid Zuhdi, *op.cit*, tanggal 24 Juni 2006.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *Kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 16 Juni 2006.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي  
بُطُونِهِمْ نَارًا، وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (النساء : 9-10)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (akibat yang membahayakan) (QS. Al-Nisa’; 9-10).

Demikianlah peringatan agar tidak memakan harta anak yatim secara zalim dengan cara tetap bertaqwa dalam mengurus anak-anak yatim yang kepengurusannya diserahkan oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak-anak mereka yang meninggal penuh ketaqwaan, perhatian, kasih sayang, mendidik dengan perkataan yang baik sebagaimana mereka memelihara harta anak yatim<sup>48</sup>.

Disinilah terdapat pengertian yang kalau kaji lebih mendalam terdapat suatu batas yang sangat tipis antara dilarikan ke konsep ahli waris pengganti dan ungensitas pengelolaan anak-anak yatim. Dan hal inilah merupakan hikmat tersendiri bagi orang-orang yang mengetahuinya.

<sup>48</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj, As'ad Yasin dkk, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Quran*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 287.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERSPEKTIF ULAMA SYURIAH NU JAWA TENGAH 2006-2008 TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 185**  
**TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI**

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan ketentuan Allah yang wajib ditaati. Karena itu, manusia tidak berhak mengubah ketentuan Allah itu (QS al-Nisa' (4): 13-14). Kemudian setelah ahli waris ditentukan hak—jumlah dan ukurannya (*nashīb mafrûd*)— atas harta warisan sesuai ketentuan Allah itu, maka ahli waris merupakan pemilik atas harta warisan yang ditentukan baginya.

Masih berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam, uraian tersebut baru terjadi setelah pewaris meninggal, dan adanya ahli waris dengan pengelompokan secara hirarkis. Namun, ketika persoalannya adalah terjadi ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka siapa yang berhak menggantikan untuk menerima warisan tersebut.

Untuk penyelesaian pembagian warisan bagi ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, dan setelah mengetahui permasalahan dan keterangan data sebagaimana diutarakan sebelumnya yang berkaitan dengan pranata kewarisan dan kedudukan ahli waris pengganti beserta perspektif ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 pada bab II dan bab III, maka diantara hal-hal yang menarik perhatian untuk dianalisis pada bab ini adalah :

**A. Analisis terhadap perspektif ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 dalam KHI Pasal 185 tentang kedudukan ahli waris pengganti**

Ekplorasi mengenai konsep ahli waris pengganti yang terakumulasi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) mengatakan bahwa : “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”<sup>1</sup>, sempat mengundang perdebatan pandangan dan pemahaman (*understanding*) cukup memanas dikalangan pemikir dan pakar hukum saat itu. Baik mereka yang sejalan dengan konsep ahli waris pengganti ataupun yang tidak sepakat dengan berbagai alasan yang melandasinya.

Di antara tokoh yang memunculkan pranata ahli waris pengganti adalah Prof. Hazairin, ia berpendapat bahwa *mawâli* atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadiya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris<sup>2</sup>. Hazairin sebagai pencetus gagasan hukum kewarisan yang mengenal penggantian tempat ini mencontohkan seorang cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000, hlm. 166.

<sup>2</sup> A.Rachman Budiono *Pembaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 22.

tua cucu yang meninggal terlebih dahulu itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya<sup>3</sup>.

Lebih lanjut Hazairin menjelaskan bahwa istilah ahli waris pengganti sebenarnya sudah tersirat dalam QS. Al-Nisa'(4); 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (النساء : 33)

Artinya: “Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya”.<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut Hazairin menegaskan kata *mawâli* berarti bahwa: ”bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawâli* bagi harta peninggalan orang tua dan mendiang *aqrabûn*, Allah mengadakan *mawâli* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabûn*-nya”<sup>5</sup>. Dan ia menterjemahkan ayat di atas sebagai berikut:

“Dan untuk setiap orang itu, Allah telah mengadakan *mawâli*-nya bagi harta peninggalan ayah dan anak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan tolan seperjanjian karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, hlm. 817.

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1989, hlm. 29.

<sup>6</sup> Abu Bakar, al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, Jakarta: Indonesian-Nederlands Cooperation in Islamic Studies- INIS, 1998, hlm. 54.



Sajuti Thalib berpendapat bahwa, anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris. Sebenarnya dengan QS. IV : 7, 11 dan 12 maka hal-hal yang perlu dalam keadaan biasa telah terselesaikan yaitu warisan untuk anak, ibu bapak, janda duda dan saudara-saudara. Tetapi nyatanya ada sesekali akan timbul kepentingan penyelesaian atas kasus kewarisan yang ahli waris pertama yaitu anak telah mati lebih dahulu dari pewaris”.<sup>7</sup>

Sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, Sajuti Thalib mengatakan penggantian ahli waris tidak ada keberatan sedikitpun, cucu dari anak perempuan tidak dibedakan kedudukannya dengan cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris mendiang kakek atau neneknya, bukan atas dasar ketentuan nas, tetapi atas dasar rasa keadilan yang dapat menjadi pertimbangan ijtihad<sup>8</sup>.

Secara ekstrim, sedangkan yang tidak sependapat dengan adanya reinterpretasi QS. Al-Nisa'(4); 33 dengan mengangkat kata *mawâli* sebagai ahli waris pengganti adalah Prof. Mahmud Yunus dan Prof. Toha Yahya Omar tetap pada pendapatnya sebagaimana yang terdapat pada kitab fiqh, dan tidak mengadakan kaji ulang terhadap dalil dan hukum

---

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, SH, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina aksara, Cet. ke-3, 1987, hlm. 151.

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, SH, “Masalah Dzawil Arham dan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 172.

yang sudah *qath'i*<sup>9</sup>. Senada dengan term tidak ada sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam adalah ungkapan seorang pakar hukum Wiryo Projodikoro, karena penggantian warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang mapan<sup>10</sup>.

Dan ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 sebagai *firqah* yang masih konsisten melestarikan ajaran *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* memandang konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam, yang dalam kasusnya adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan menggantikan anak yang meninggal terlebih dahulu dan masih ada ahli waris anak yang lainnya, mereka masih berkiblat pada literatur fiqh kewarisan yang dikembangkan oleh *ahl al-sunnah* (sunni)<sup>11</sup> yaitu dari Al-Qur'an yang sudah menentukan bagian-bagian ahli waris secara jelas dan al-sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan *ijtihâd* Zaid bin Tsabit yaitu mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya hanya dipandang sebagai ahli waris *dzaw al-arhâm*, yang mereka semuanya tidak menerima harta warisan. Cucu laki-laki atau

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: angkasa Raya, Cet. ke-2, 1993, hlm. 134.

<sup>10</sup> Wiryo Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm. 43. ia mengemukakan pendapatnya "bahwa tidak dikenal ahli waris pengganti dalam hukum Islam", dikutip dari Ramulyo Muh Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 123.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *Kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 23 Juni 2006.

perempuan melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup dikarenakan mahjub<sup>12</sup>.

Jadi, dapat dipertegas bahwa dalam hal membicarakan kedudukan ahli waris pengganti —menurut hemat penulis— ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 konsisten mengikuti rumusan paham kewarisan patrilineal Syafi'i yang pada konsekuensinya bahwa cucu yang berhak hanyalah cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak berhak tampil sebagai ahli waris. Secara rinci kewarisan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki sebagai berikut :

1. Cucu laki-laki berhak atas bagian anak laki-laki (ayahnya) yang meninggal, jika tidak ada anak laki-laki (saudara laki-laki dari ayahnya). Jika ada anak laki-laki maka cucu laki-laki tidak berhak mewaris.
2. Cucu perempuan barhak atas bagian sebagaimana diterima anak perempuan dan bukan seperti yang diterima anak laki-laki (ayahnya). Jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka cucu perempuan tidak berhak mewaris<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan KH.Abdul Wahid Zuhdi, wakil ra'is ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2006.

<sup>13</sup> Idris Jakfar, Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, Cet ke-1, 1995, hlm. 68.

**B. *Istinbâth* hukum dalam pembagian warisan perspektif ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 tentang kedudukan ahli waris pengganti**

Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 adalah mengikuti bagaimana ulama' *salaf al-shalih* bermadhab dan *beristinbâth*. Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dengan menganut salah satu dari madzhab empat dalam fiqh, sikap ini secara konsisten ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqh dari referensi (*marâji'*) berupa kitab-kitab fiqh (*al-kutub al-mu'tabarât*)<sup>14</sup> yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: '*ibâdat*, *mu'âmalat*, *munâkahat* (hukum keluarga) dan *jinâyat* atau *qadhâ'* (pidana atau peradilan)',<sup>15</sup>.

Penulis mencermati bahwa ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dalam mengambil keputusan hukum dan bermadzhab mengikuti dua metode. *Pertama*, mengikuti secara *qawli*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah menjadi keputusan dan pendapat dalam lingkup madzhab tertentu. Sehingga tidak diperlukan reformulasi ketetapan hukum yang baru. Dan *kedua*, secara *manhaji*, artinya,

---

<sup>14</sup> Dalam keputusan Musyawarah Nasional 'alim ulama' Nahdhatul Ulama' nomor I/MAUNU/1404/1983, tentang hukum atas beberapa masalah *diniyyah* mensahkan bahwa *al-kutub al-mu'tabarât fi al-masâil al-diniyyah* '*indanâ* ialah kitab-kitab '*alâ al-madhâhib al-arba'ah*. Lihat, Nahdhatul Ulama' (Pengurus Besar NU), *Nahdhatul Ulama' Kembali Khittah 1926*, Bandung: Risalah Bandung, , Cet. ke-1, 1984, hlm. 42.

<sup>15</sup> Djamaluddin Miri (penerj), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhotul Ulama' (1926-1999)*, Jawa Timur: Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU, Cet. ke-2, 2005, hlm. ix.

bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaedah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab<sup>16</sup>.

Lebih jelas, dalam hal metode mencari solusi masalah dan pengambilan keputusan ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dalam forum *bahts al-masâil* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum (metode ijtihad atau *istinbâth*) kepada *aqwâl al-mujtahidîn* (pendapat para mujtahid) yang *mutlaq* maupun *muntasib*. Apabila sudah diketemukan *qawl manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharrij* (pendapat hasil *takhrij*). Apabila terjadi *khilâf* (perbedaan pendapat) maka diambil pendapat (*wajh*) yang paling kuat sesuai dengan pen-*tarjih*-an ulama' yang sudah memenuhi kriteria ahli *tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam *khilâf* akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyyah tahsiniyyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyyah* (kebutuhan primer)<sup>17</sup>.

Dan apabila pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) dalam kitab-kitab standard (baik *qawli* maupun *wajah*), dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhâq*, karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhâq*, maka langkah yang ditempuh

---

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2002, hlm. 179.

<sup>17</sup> Djamaluddin Miri, *op cit.*, hlm. ix.

adalah *istinbâth* secara *jamâ'i* (kolektif) dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya<sup>18</sup> dengan mengaplikasikan kaidah *usûl* dan kaidah *fiqh*<sup>19</sup>.

Dari perjalanan penentuan keputusan hukum diatas, keberadaan ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 tidak dapat dipisahkan dengan *manhaj istinbâth* imam Syafi'i yang dalam problema sosial keagamaan selalu mengedepankan *al-Kitâb, al-Sunnah, al-Ijma'* dan *al-Qiyas* ditetapkan dan kemudian dianggap sebagai sumber bagi perundang-undangan<sup>20</sup>.

قال الشافعي: وهذا الصَّنْف من العلم دليل على ما وصفتُ قبل هذا: على أن ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء: حَلٌّ ولا حَرْمٌ -: إلا من جهة العلم الخَيْرُ في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.<sup>21</sup>

Artinya: *Al-Syafi'i berkata: tidak seorangpun diperbolehkan untuk menyatakan bahwa sesuatu dihalalkan atau diharamkan kecuali melalui otoritas ilmu, dan otoritas ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dari al-Kitâb, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.*

Mereka ulama' syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008, memandang konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *op cit.*, hlm. 181. lihat M. Ridlwan Qoyyum Said, *Rahasia Sukses Fuqoha'*, Lirboyo, Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP), hlm. 38.

<sup>19</sup> Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista, 2005, hlm. 51

<sup>20</sup> Muhamad Shahrûr, *Nahw Usûl Jadîlah Li Al-Fiqh Al-Islâmi*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanudin, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet. ke-2, 2004, hlm. 252.

<sup>21</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Risâlah*, Bairut: Dâr al-Fikr, hlm. 39

islam, yang dalam kasusnya adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan menggantikan anak yang meninggal terlebih dahulu dan masih ada ahli waris anak yang lainnya, adalah tidak sesuai dengan Al-Qur'an yang sudah menentukan bagian-bagian ahli waris secara jelas dan al-sunnah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan *qawl manshush* (pendapat yang telah ada nashnya) *ijtihâd* Zaid bin Tsabit yaitu mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya hanya dipandang sebagai ahli waris *dzaw al-arhâm*, yang mereka semuanya tidak menerima harta warisan. Cucu laki-laki atau perempuan melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup dikarenakan mahjub<sup>22</sup>. Sehingga tidak perlu ada penelusuran ijtihad lebih lanjut.

Mereka ulama' syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 lebih memprioritaskan kasus ini —ketika cucu pada posisi dan kondisi menjadi yatim— bagaimana kaum muslimin terhadap anak-anak yatim dapat memberikan perhatiannya lebih intensif.

Setelah mengetahui otoritas keilmuan dan keagamaan (*sulthah dîniyyah*), madzhab dan metode *istinbâth* hukum ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008, maklum bahwa mereka berafiliasi dan berangkat dari pandangan idiologi *ahl al- sunnah wa*

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan KH.Abdul Wahid Zuhdi, wakil ra'is ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2006.

*al-jama'ah* yang menjadikan madzhab Syafi'i sebagai jalan pendekatan berfikir dalam bidang hukum islam (*fiqh*) maka seluruh hal yang berupa keputusan-keputusan, ajaran-ajaran, perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah diterapkan di dalamnya merupakan hakekat islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah dibahas panjang lebar mengenai konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dari sudut pandang (perspektif) ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008, maka untuk mengakhiri pembahasan-pembahasan dalam karya ilmiah ini, penulis setelah menganalisa, mengamati dan mencermati uraian bab-bab sebelumnya, perlu mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik serta di samping itu dapat pula diajukan beberapa saran untuk mendapat perhatian dari semua pihak.

#### **A. Kesimpulan**

1. Kuatnya dominasi para *fuqaha'* Indonesia dalam berafiliasi terhadap madzhab tertentu sangat mempengaruhi corak ijtihad hukum Islam, termasuk ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 yang mendeklarasikan mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Sehingga ketika memberikan keputusan-keputusan masalah keagamaan, mereka tetap berkiblat pada rujukan kitab-kitab fiqh klasik *mu'tabar*. Hal ini terbukti dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 tentang kedudukan ahli waris pengganti, yang dalam kasusnya adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan menggantikan anak yang meninggal terlebih dahulu dan masih ada ahli waris anak yang lainnya, menjadikan status ahli waris pengganti menempati posisi ahli waris, dikarenakan ia menggantikan posisi ahli

waris yang sejati meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan statusnya sebagai ahli waris, maka mereka berhak menerima warisan sama dengan banyaknya warisan yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan.

Wakil ro'is dan *kâtib* Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dan diikuti ulama' yang lain di dalam realitanya berpendapat bahwa menanggapi kasus ahli waris pengganti ternyata tidak dikenal dalam fiqh kewarisan Islam. Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 menempatkan literatur fiqh kewarisan yang dikembangkan oleh *ahl al- sunnah* (sunni) masih sebagai kiblat yang faktual, dikarenakan selama masih ada *dzaw al-furûdl* —anak, orang tua, saudara dan suami istri— bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan semuanya hanya dipandang sebagai ahli waris *dzaw al-arhâm*, yang mereka semuanya tidak menerima harta warisan. Cucu laki-laki atau perempuan melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup dikarenakan mahjub.

2. Dalam konteks apresiasi tradisi berijtihad keberadaan ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 berdasarkan otoritas keilmuan keagamaan, sebagai ulama' yang mewarisi budaya berijtihad dan beristinbâth hukum dari faham *ahl al- sunnah wa al-jama'ah* yang mengikuti aliran Imam Syafi'i tentunya proses urutan

*istinbâth* hukumnya tidak terlepas dari *al-Kitâb*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Disamping itu dengan lembaga organisasi yang menguatkan ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 mempunyai wilayah fatwa yang diikuti oleh kaum muslimin sebagai aplikasi dari hasil *berijtihad* dan *beristinbâth*. Berkenaan dengan kewarisan konsep ahli waris pengganti ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 mendasarkan Al-Qur'an surat *al-Nisâ'* ayat 11 dan 12 secara jelas telah menentukan bagian-bagian ahli waris yang pada saatnya mendapatkan haknya sebagaimana dipertegas QS. ayat 33. Dan berdasar *al-Sunnah* yang diriwayatkan oleh imam Bukhari sebagai *qawl manshush* (pendapat yang telah ada nashnya) yaitu *ijtihad* Zaid bin Tsabit yang mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki jadi semuanya menempati posisi sebagai ahli waris *dzaw al-arhâm*, yang mereka semuanya tidak menerima harta warisan. Begitu juga ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 memandang cucu laki-laki atau perempuan melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup dikarenakan mahjub. Sehingga tidak perlu ada penelusuran *ijtihad* lebih lanjut. Jadi *istinbâth* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dalam kewarisan ini selama masih ada *qawl manshush*, tidak perlu menggali hukum yang lain.

Mereka ulama' syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 lebih memprioritaskan kasus ini —ketika cucu pada posisi dan kondisi menjadi yatim— adalah sebagai syari'at tersendiri sebagai potensi yang urgensinya mengajak kaum muslimin merapatkan barisan, menjadi garda depan dalam memperhatikan anak-anak yatim secara lebih intensif.

#### B. Saran-saran

1. Aturan-aturan *al-irts* (pembagian warisan) yang telah termaktub dalam ketentuan Allah merupakan nilai-nilai yang mempunyai potensi untuk mewujudkan keadilan yang terkait dengan kepentingan pribadi ahli waris dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta.
2. Kiranya para pemerhati, pengguna hukum Islam di Indonesia saatnya untuk berperan membantu terwujudnya rasa keadilan sebagaimana nilai-nilai distribusi yang diinginkan.
3. Ijtihad dengan prosesnya *beristinbâth* dalam rangka menggali dan menetapkan hukum merupakan keharusan yang tidak dapat dinafikan.

#### C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas limpahan rahmat, hidayat, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun apabila dikaji lebih dalam masih banyak kekurangan di sana-sini.

“Tak ada gading yang tak retak”, sebuah ungkapan yang sepantasnya melekat pada karya ilmiah ini. Dengan kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak, demi perbaikan sempurna skripsi ini.

Dan pada akhirnya tiada untaian kata yang tidak dapat membahagiakan penulis, kecuali sebuah celah cerah do’a semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pecinta ilmu, penegak hukum dan para pembaca yang budiman. *Âmîn Yâ Robbal ‘Alamîn*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *I'tiqad Ahlul Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983.
- Abu Bakar, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1987
- al Yasa, Abu Bakar, , *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS, 1998
- Ahmad, Dadang K. *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Adipura, Cet. ke-1, 2002.
- Arief, Muhammad, *Hukum waris dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002
- ....., *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-7, 2005
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Baijuri Al, Ibrahim, *Hasyiyyah Al Baijûri*, jilid II, Bairut Libanon: Dâr al Fikr, 1982
- Bakar, Abu, Aceh H, *Perbandingan Madzhab Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam*, Semarang Sala: Ramadhani, 1980
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Budiono, A.Rachman, *Pemabaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bandung: PT Gitra Aditya Bakti, 1999

- Burhanuddin, Jajat, Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 31.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1989
- ....., *Bahan penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Dirdjosanjoto, Prajarta, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar Jawa*, Yogyakarta: LKis, 1999.
- Fealy, Greg, Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan NAHDHOTUL ULAMA-NEGARA*. Terj. LKiS " *Nahdhotul Ulama' Tradisional Islam and Modernity in Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, Cet. I, 1997
- ....., *Ijtihad politik Ulama Sejarah Nahdhotul Ulama' 1952-1967*, terj. LKis, *Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdhotul Ulama' 1952-1967*, Yogyakarta: LKis, 1998.
- Feillard, Andree, NU Vis-à-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Terj. *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, Jakarta: Panjimas, 1983.
- Harjono, Anwar, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an; Komentar Singkat Atas Teori Prof. Hazairin", dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1981
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1989
- Husain, Abdul Karim, *NU Menyongsong Tahun 2000*, Kendal: CV. MA Noer Ghamid, 1989
- Ida, Laode, "Kelompok Progresif di Tengah NU", dalam Elyasa KH. Darwis, Sayed Mahdi (eds.), *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004.

- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris (menurut K.U.H Perdata, Hukum adat dan Hukum Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jabali, Fuad, (ed), *Islamic Law and Adat Encourter: The Experience of Indonesia*, Jakarta Selatan: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Jakfar, Idris, Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, Cet ke-1, 1995, hlm. 68.
- Jassin, *Bacaan Mulia*, Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942, cet II, 1982
- Khadim al Haramain asy Syarifain, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Kerajaan Saudi Arabia: Muja'mma' al Malik Fadh li Thiba'at al mush-haf, TT, hlm. 128
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Lubis, Suhrawardi, Simanjutak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU: Setelah kembali Khittah 1926*, Bandung: Erlangga, 1992.
- Miri, Djamaluddin (penerj), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhotul Ulama' (1926-1999)*, Jawa Timur: Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU, Cet. ke-2, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2002,
- Muzadi, Muchit, *NU dan Fiqh Kontektual*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994
- Nahdhatul Ulama' (Pengurus Besar NU), *Nahdhatul Ulama' Kembali Khittah 1926*, Bandung: Risalah Bandung, , Cet. ke-1, 1984.
- Naim, Mochtar, *Kompendium Himpunan ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Jakarta: Hasanah, 2001.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Praja S, Juhaya., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 111.



- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm. 43.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Palangkaraya, *Himmah; Jurnal Ilmu keagamaan dan Kemasyarakatan*, TT.
- Qomar, Mujamil, *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002, Cet I.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj, As'ad Yasin dkk, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Quran*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 287.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. Ke-6, 2002.
- ....., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997
- Rozikin, Daman, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, Kairo: Al-Istiqamah, TT
- Saekan dan Erniati, Effendi Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977
- Said, Qoyyum M. Ridlwan, *Rahasia Sukses Fuqoha'*, Lirboyo, Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP), hlm. 38.
- Shabuni, Ash. Muhammad Ali, *Al-Mawâris fi al Syarî'at al Islâmiyyah fi Dhou' al Kitâb wa al Sunnah*, 'Âlam al Kutub, TT.
- ....., *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1995.
- Shahrûr, Muhammad, *Nahw Usûl Jadîlah Li Al-Fiqh Al-Islâmi*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanudin, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet. ke-2, 2004, hlm. 252.
- Shofa Ash, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Siddiq, Achmad, *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista, 2005.

- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2003
- Surat Keputusan PB. NAHDHATUL ULAMA', Nomor: 635. b / A.II.03.04.d / 03 / 2006, tentang Pengesahan PWNU Propinsi Jawa Tengah antar waktu masa khidmat 2006-2008
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998.
- Syafi'i, al Muhammad bin Idris, *Al Risâlah*, Bairut: Dâr al-Fikr.
- Syairazy Al, *Al Muhadzdzab*, Juz II, Bairut Libanon, Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran alam Hukum Islam*, Padang: angkasa Raya, Cet. ke-2, 1993.
- Syarqawy al, Abdullah ibn Hijâzy ibn Ibrahim al Syafi'i, *Hâsyiyyah al Syarqâwy*, Juz II, Bairut Libanon: Dâr al Fikr, 1982.
- Syatha, Abu Bakar Utsman, *Hasyiyyah I'anat al Thalibîn*, Bairut Libanon, Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1995.
- Segaf, al, 'Alawy ibn Ahmad *Tarsyikh al Mustafidîn 'ala Syarh Fath Mu'in*, Surabaya: Syirkah Bunkul Indah. TT.
- Tebba, Sudirman, "Restrukturisasi Kepengurusan NU" dalam Marzuki Wahid, Abd. Moqsith Ghazali, Suwendi (ed.s), *Geger di "Republik" NU Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1999.
- Thalib, Sajuti, SH, "Masalah Dzawil Arham dan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- ....., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-8, 2004
- Wahid, Abdurrahman, et al, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- wawancara dengan KH. Abdul Wahid Zuhdi, Wakil Rais Ulama' Syuriah I NU Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2006.
- wawancara dengan KH. Najib Hasan, wakil rais ulama' syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008, tanggal 9 Juni 2006.

wawancara dengan KH. Ubaidillah Shadaqah, SH, *kâtib* ulama' Syuriah NU Jawa Tengah, tanggal 07 Juni 2006.

Yusuf, Slamet Effendy, *et al.*, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, ..... : CV. Rajawali, 1983.

Zuhaily al, Wahbah, *Al Fiqh Al Islâmiy wa Adillatuhu*, Jilid X, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997.

Zuhri, Saifuddin, *Menghidupkan Nilai-Nilai Ahlussunah wal Jamaah*, Jakarta:PP IPNU, 1976